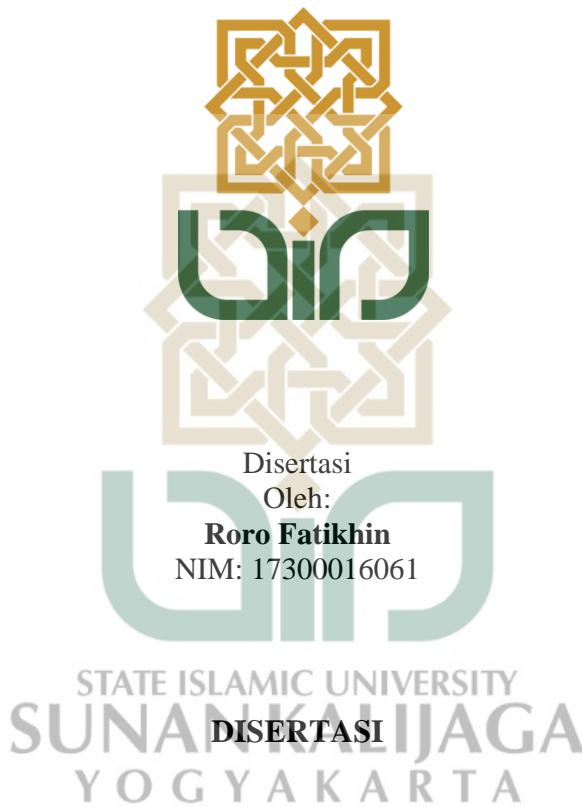


ARAB SAUDI DAN VISI 2030:
Dari Konservatif Menuju Modernis dalam Pembangunan
Sosial Politik di Bawah Muhammad bin Salman



Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Doktor dalam Bidang Studi Islam

YOGYAKARTA
2024



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roro Fatikhin
NIM : 17300016061
Jenjang : Doktor

menyatakan bahwa naskah **disertasi** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Juli 2024

Saya yang menyatakan,

Roro Fatikhin

NIM: 17300016061

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Judul Disertasi	: ARAB SAUDI DAN VISI 2030: DARI KONSERVATIF MENUJU MODERNIS DALAM PEMBANGUNAN SOSIAL POLITIK DI BAWAH MUHAMMAD BIN SALMAN
Ditulis oleh	: Roro fatikhin
NIM	: 17300016061
Program/Prodi.	: Doktor (S3) / Studi Islam
Konsentrasi	: Kajian Timur Tengah

Telah dapat diterima

Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr.)
Dalam Bidang Studi Islam

Yogyakarta, 22 Agustus 2024



Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.
NIP.: 197010242001121001

YUDISIUM

BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM UJIAN TERTUTUP PADA TANGGAL 10 Juli 2024, DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM SIDANG UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS RORO FATIKHIN, NOMOR INDUK: 17300016061 LAHIR DI GUNUNG TERANG TANGGAL 07 Juli 1988,

LULUS DENGAN PREDIKAT :

PUJIAN (CUM LAUDE)/SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN**

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR STUDI ISLAM KONSENTRASI KAJIAN TIMUR TENGAH DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

*SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE-978

YOGYAKARTA, 22 AGUSTUS 2024



Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.
NIP.: 197010242001121001

** CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN

DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR

Nama Promovendus : RORO FATIKHIN (Omar)
NIM : 17300016061
Judul Disertasi : ARAB SAUDI DAN VISI 2030: DARI KONSERVATIF MENUJU MODERNIS
DALAM PEMBANGUNAN SOSIAL POLITIK DI BAWAH
MUHAMMAD BIN SALMAN

Ketua Sidang : Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.
Sekretaris Sidang : Najib Kailani, S.Fil.I., M.A., Ph.D.

Anggota : 1. Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc., M.Ag. (Promotor/Penguji)
2. Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si. (Promotor/Penguji)
3. Prof. Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A. (Penguji)
4. Achmad Uzair, S.I.P., M.A, Ph.D. (Penguji)
5. Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A. (Penguji)
6. Dr. Munirul Ichwan, Lc., M.A. (Penguji)

Di Ujian Di Yogyakarta Pada Hari KAMIS Tanggal 22 Agustus 2024

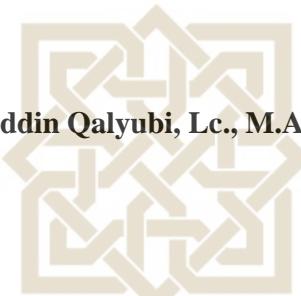
Tempat : Aula Lt. 1 Gd. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Waktu : Pukul 13.00 WIB. S.d Selesai
Hasil / Nilai (IPK) : 3.68
Predikat Kelulusan : Pujian (Cumlaude)/ Sangat Memuaskan/ Memuaskan



PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor I

Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc., M.Ag



Promotor II

Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum, wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

ARAB SAUDI DAN VISI 2030: DARI KONSERVATIF MENUJU MODERNIS DALAM PEMBANGUNAN SOSIAL POLITIK DI BAWAH MUHAMMAD BIN SALMAN

yang ditulis oleh:

Nama : Roro Fatikhin, S.Hum., M.Hum
NIM : 17300016061
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 10 Juli 2024, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Studi Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 22 Juli 2024

Promotor I,



Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc. M.Ag.
NIP: 195209211984031001

NOTA DINAS

Kepada Yth,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum, wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

ARAB SAUDI DAN VISI 2030: DARI KONSERVATIF MENUJU MODERNIS DALAM PEMBANGUNAN SOSIAL POLITIK DI BAWAH MUHAMMAD BIN SALMAN

yang ditulis oleh:

Nama : Roro Fatikhin, S.Hum., M.Hum
NIM : 17300016061
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 10 Juli 2024, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Studi Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Juli 2024
Promotor II,
Dr. Subaidi, S.Ag, M.Si.
NIP: 197505172005011004

NOTA DINAS

Kepada Yth,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum, wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

ARAB SAUDI DAN VISI 2030: DARI KONSERVATIF MENUJU MODERNIS DALAM PEMBANGUNAN SOSIAL POLITIK DI BAWAH MUHAMMAD BIN SALMAN

yang ditulis oleh:

Nama : Roro Fatikhin, S.Hum., M.Hum
NIM : 17300016061
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 10 Juli 2024, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Studi Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb. STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Yogyakarta, 22 Juli 2024
Penguji,


Prof. Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
NIP: 197612032000031001

NOTA DINAS

Kepada Yth,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum, wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

ARAB SAUDI DAN VISI 2030: DARI KONSERVATIF MENUJU MODERNIS DALAM PEMBANGUNAN SOSIAL POLITIK DI BAWAH MUHAMMAD BIN SALMAN

yang ditulis oleh:

Nama : Roro Fatikhin, S.Hum., M.Hum
NIM : 17300016061
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 10 Juli 2024, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Studi Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Yogyakarta, 19 July 2024
Penguji,


Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.
NIP: 197010242001121001

NOTA DINAS

Kepada Yth,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum, wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

ARAB SAUDI DAN VISI 2030: DARI KONSERVATIF MENUJU MODERNIS DALAM PEMBANGUNAN SOSIAL POLITIK DI BAWAH MUHAMMAD BIN SALMAN

yang ditulis oleh:

Nama : Roro Fatikhin, S.Hum., M.Hum
NIM : 17300016061
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 10 Juli 2024, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Studi Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 22 Juli 2024

Pengaji,



Achmad Uzair, S.IP., M.A., Ph.D
NIP: 197803152011011002

ABSTRAK

Sejak abad ke-18 hingga awal abad ke-21, Arab Saudi telah dikenal sebagai negara yang kuat dalam mengikuti pemahaman agama, khususnya dalam aliran Wahabi. Negara ini mendasarkan konstitusinya pada al-Quran dan Sunah, yang memunculkan reputasi sebagai negara yang kaku dan konservatif di antara umat Islam lainnya. Pemahaman ini menekankan perlunya menegakkan kebenaran sesuai dengan paham Wahabi, yang berdampak besar pada kehidupan sosial dan budaya masyarakat Arab Saudi. Arab Saudi berbeda dengan negara-negara berpenduduk muslim lainnya dalam gaya hidup dan praktik keagamaanya. Citra konservatif telah membuat sulit bagi Arab Saudi untuk beradaptasi dengan tantangan global sebagai negara modern sehingga dibutuhkan komitmen kuat dalam mereformasi tatanan sosial dan budaya di negara ini pada masa Muhammad bin Salman.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosial politik. Teori yang digunakan pertama, teori otoritas dengan merujuk pada Plato dan Ibnu Taimiyah. *Kedua*, teori modernisasi yang dikembangkan oleh Evsey Domar dan Roy Harrod. *Ketiga*, teori Strukturasi Antony Giddens yang digunakan untuk menganalisis dinamika politik dalam perubahan sosial.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahun 2016 menjadi awal dari perubahan sosiokultural yang diprakarsai oleh Raja Salman bin Abdul Aziz, melalui putranya, Muhammad bin Salman, yang memiliki otoritas untuk mengusung gagasan besar mengubah Arab Saudi dari negara konservatif menjadi modern dan dinamis. Gagasan ini terwujud dalam Visi Saudi 2030, yang telah memberikan dampak signifikan terhadap perubahan di Arab Saudi saat ini. Salah satunya adalah perubahan dalam pengambilan kebijakan sosial yang tidak lagi berkompromi dengan ideologi agama. Hal ini menimbulkan tantangan sosial, politik, dan keagamaan yang dihadapi pemerintahan Arab Saudi, yang meresponsnya dengan kebijakan-kebijakan modernisasi

di bidang sosial, politik, dan keagamaan. Contohnya adalah peningkatan kebebasan bagi perempuan dibandingkan dengan masa sebelumnya, serta diversifikasi ekonomi dengan pengembangan tempat wisata, hiburan, dan peningkatan akses pendidikan, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan lapangan kerja dan pemasukan negara Saudi dari selain pendapatan negara dari sektor minyak.

Kata Kunci: *Konservatif, Modernisasi, Perubahan Sosial, Visi Saudi 2030.*



ABSTRACT

From the 18th century to the early 21st century, Saudi Arabia has been recognized for its strong adherence to religious principles, particularly those of the Wahhabi sect. The country's constitution is based on the Al-Qur'an and Sunnah, contributing to its reputation as a rigid and conservative state among other Muslim nations. This understanding emphasizes strict adherence to Wahhabism, significantly impacting the social and cultural life of Saudi society. Compared to other populous Islamic countries, the differences in lifestyle are pronounced. This conservative image has hindered Saudi Arabia's adaptation to globalization and progress, requiring considerable courage and strength to effect social and cultural changes, especially during the era of Muhammad bin Salman.

This research falls under the category of library research and employs qualitative methods with a socio-political approach. The theoretical frameworks used include, first, the Theory of Authority referencing Plato and Ibn Taimiyah; second, the Theory of Modernization developed by Evsey Domar and Roy Harrod; and third, the Theory of Structuration by Antony Giddens, which is used to analyze political dynamics in social change.

The findings of this research show that 2016 marked the beginning of sociocultural changes initiated by King Salman bin Abdul Aziz through his son, Muhammad bin Salman, who was authorized to implement the significant vision of transforming Saudi Arabia from a conservative to a modern and dynamic country. This vision is embodied in Saudi Vision 2030, which has had a profound impact on the country's transformation. One notable change is the shift in social policy-making, which no longer compromises with religious ideology. This shift has introduced social, political, and religious challenges for the Saudi government, which has responded with modernization policies across various domains. Examples include increased freedoms for women compared to previous eras, economic diversification through the development of tourism and entertainment,

and enhanced access to education, all contributing to greater employment opportunities and income diversification beyond the oil sector.

Keywords: Conservatives, Modernization, Social Change, Saudi Vision 2030.



مستخلص البحث

منذ القرن الثامن عشر حتى بداية القرن الحادي والعشرين، عُرفت المملكة العربية السعودية بأنها دولة تتلتم بمعتقدات دينية قوية، وخاصة في المذهب الوهابي. وبين البلد دستوره على القرآن والسنة، مما يمنحه سمعة كدولة صارمة ومحافظة بين المسلمين الآخرين. ويؤكد هذا الفهم على ضرورة إعلاء الحق وفق المذهب الوهابي الذي له الأثر الكبير في الحياة الاجتماعية والثقافية للمجتمع السعودي. وبالمقارنة مع الدول الإسلامية الأخرى ذات الكثافة السكانية العالية، فإن الاختلافات في نظر الحياة حقيقة للغاية. هذه الصورة المحافظة تجعل من الصعب على السعودية التكيف مع العولمة أو التقدم كدولة، لذا فإن التغيير الاجتماعي والثقافي في هذا البلد يتطلب شجاعة وقوة كبيرة في عهد صاحب الجلالة الملك محمد بن سلمان. يندرج هذا البحث ضمن فئة الأبحاث المكتبية التي تستخدم الأساليب النوعية ذات النهج الاجتماعي السياسي. وتشمل النظريات المستخدمة فيه نظرية القوة التي تشير إلى أفلاطون وابن تيمية، ونظرية التحديد التي طورها إيفسي دومار وروي هارود، ونظرية الميكلة لأنطونи جيدينر والتي تُستخدم لتحليل الديناميكيات السياسية في التغيير الاجتماعي.

النتائج التي توصل إليها هذا البحث هي أن عام ٢٠١٦ كان العام الأول للتغيرات الاجتماعية والثقافية التي بدأها صاحب الجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، من خلال نجله محمد بن سلمان، الذي يملك السلطة لتنفيذ أفكار كبيرة للتغيير في المملكة العربية السعودية ابتداءً من دولة محافظة سابقاً لتصبح دولة حديثة وдинاميكية. وقد تحققت هذه الفكرة في رؤية السعودية ٢٠٣٠ والتي لها تأثير كبير على التغيرات التي تشهدها المملكة العربية السعودية حالياً. وأحد هذه

التغيرات هو التغيير في عملية صنع السياسة الاجتماعية التي لم تعد ت تعرض الأيديولوجية الدينية. وأدى ذلك إلى ظهور تحديات اجتماعية وسياسية ودينية واجهتها الحكومة السعودية، والتي استجابت لها بسياسات التحديث في الحالات الاجتماعية والسياسية والدينية. وتشمل الأمثلة زيادة الحرية للمرأة مقارنة بالعصور السابقة، وتنويع الاقتصاد مع تطور مناطق الجذب السياحي والترفيهي، وزيادة الوصول إلى التعليم، وكلها تساهم في زيادة فرص العمل والدخل للدولة السعودية خارج قطاع النفط.

الكلمات المفتاحية : الحافظة، التحديث، التغيير الاجتماعي، رؤية السعودية

. ٢٠٣٠



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *difong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	a	a
ـ	Kasrah	i	i
ـ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يُ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- | | | |
|---|---------|--------|
| - | كِتَبَ | kataba |
| - | فَعَلَ | fa`ala |
| - | سُيَّلَ | suila |
| - | كَيْفَ | kaifa |
| - | حَوْلَ | haulaa |

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اً...اِ...اً	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قَيْلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/ al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةٌ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَلَ nazzala
- الْبَرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu الـ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلْمَنْ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta’khužu
- شَيْعَ syai’un
- النَّوْءُ an-nau’u
- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāzīqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāzīqīn
- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmān ir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَيْبًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan, hidayah, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi yang berjudul *“Arab Saudi dan Visi 2030: Dari Konservatif Menuju Modernis dalam Pembangunan Sosial Politik di Bawah Muhammad bin Salman”* ini sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan. Sholawat dan Salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya sampai hari akhir.

Pada kesempatan yang baik ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan sumbangsih besar, baik berupa materil, non-materil, dorongan, semangat, dan bimbingan dari sejak dimulainya penulisan disertasi ini sampai selesai. Penulis menyadari dengan adanya semua itu, penulisan disertasi ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Maka dari itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

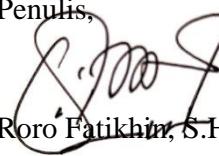
1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. sekalu Rektor UNI Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. KH. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ahmad Rofiq, S.Ag., M.Ag., MA., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Munirul Ikhwan, Lc. MA. selaku Sekretaris Program Studi Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc. M.Ag. selaku Promotor I yang telah memberikan banyak bantuan, arahan, bimbingan, dan koreksi serta memberikan dorongan serta semangat sampai selesainya penulisan disertasi ini.
6. Dr. Subaidi, S.Ag, M.Si. selaku Promotor II yang juga telah memberikan banyak bantuan, arahan, bimbingan, dan koreksi serta memberikan dorongan serta semangat sampai selesainya penulisan disertasi ini.
7. Prof. Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A., Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A., dan Achmad Uzair, S.IP., M.A., Ph.D.

- selaku Penguji yang telah memberikan masukan, saran, dan juga koreksi atas penyempurnaan disertasi ini.
8. Bapak-bapak dosen Program Studi Doktor Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah berjasa memberikan tambahan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis sejak masa studi di Pascasarjana,
 9. Ayahanda (KH. Nur Mu' alim Musthafa), Ibunda (Hj. Munawaratuh Tahliyah), kakakku (M. Nasrullah dan Nurul Fu'adiyah), dan adikku (Rohmatul Izat dan Ahmad Sahid Musthafa), yang penulis muliakan dan sayangi dan yang selalu memberikan doa, dorongan kepada penulis serta membantu penulis baik secara moril maupun materil,
 10. Kepada Istri tercinta Rizki Amalia, serta kedua putra kami yakni Muhammad Kian Hasbullah Agus Faza dan Muhammad Hannan Zubair Dahlan, yang telah banyak memberikan semangat dan selalu sabar menemani penulis dalam menyelesaikan penulisan disertasi ini,
 11. Seluruh teman yang juga bahu-membahu bersama dalam menempuh pendidikan di Program Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
 12. Keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Huda Gunung Terang Desa Lehan Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur, yang selalu memberikan dukungan kepada penulis sejak masa studi sampai sekarang.

Kepada semuanya, penulis ucapkan banyak terima kasih yang tidak terhingga. Semoga Allah memberikan balasan berupa kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Akhirnya, dengan selesainya penulisan disertasi ini, penulis berharap semoga disertasi ini memberikan manfaat berupa wawasan dan pengetahuan bagi siapa saja yang membacanya.

Yogyakarta, 20 Juli 2024

Penulis,



Roro Fatikhin, S.Hum., M.Hum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME	iii
PENGESAHAN REKTOR	iv
YUDISIUM	v
DEWAN PENGUJI	vi
PENGESAHAN PROMOTOR	vii
NOTA DINAS	viii
ABSTRAK	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xix
KATA PENGANTAR	xxv
DAFTAR ISI	xxvii
DAFTAR DIAGRAM, TABEL DAN GAMBAR	xxxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Kerangka Teoretis	14
F. Metode Penelitian	27
G. Sistematika Pembahasan	30
BAB II ARAB SAUDI DAN OTORITAS KEBIJAKAN: KONSERVATISME IDEOLOGI WAHABI DALAM KEBIJAKAN ARAB SAUDI	33
A. Lahir dan Perkembangan Arab Saudi sebagai sebuah negara	33
1. Arab Saudi Periode Pertama: Deklarasi Dinasti Al-Saud	35
2. Arab Saudi Periode Kedua: Kebangkitan Kembali Arab Saudi	40

3. Arab Saudi Periode Ketiga	44
B. Model, Bentuk, dan Sistem Negara Arab Saudi	55
C. Label Arab Saudi sebagai Negara Konservatif	
Berideologi Wahhabi	61
1. Sekilas tentang Wahhabisme dan Pendirinya	64
2. Kaidah Berfikir Idiologi Wahhabi	68
3. Tokoh-tokoh Salafi Wahhabi di Arab Saudi	73
D. Kebijakan Konservatif pada Ideologi Wahhabi	
di Arab Saudi	82

BAB III MODERNISASI ARAB SAUDI:

PINTU PERUBAHAN	85
A. Munculnya Paradigma Modernisasi Arab Saudi	85
1. Ide Modernisasi	85
2. Unsur-Unsur Pembentuk Modernisasi	
Arab Saudi	92
a. Minyak Sebagai Fondasi Awal Kemajuan	
Ekonomi Arab Saudi	92
b. Visi Saudi 2030.....	96
3. Kebijakan Arab Saudi Terhadap Ekonomi	
Modern.....	99
B. Pengaruh Muhammad bin Salman terhadap	
Reformasi dan Visi Saudi 2030	111
1. Muhammad Bin Salman	111
2. Kebijakan Muhammad bin Salman dalam	
Upaya Modernisasi dan Reformasi Arab Saudi....	113
a. Pembangunan Masyarakat Maju	114
b. Pembangunan Ekonomi Negara	118
c. Tujuan Nasional Negara Arab Saudi	122
3. Dampak Modernisasi Arab Saudi terhadap	
Perubahan Sosial	126
4. Pilar Kebangkitan Modernisasi Visi Saudi 2030 .	129
C. Kebijakan luar negeri Arab Saudi Di Bawah	
Program Reformasi	135
1. Kebijakan politik luar negeri Arab Saudi	135

2. Peluang dan Tantangan Gerakan Modernisasi	
Muhammad bin Salman	141

BAB IV PERGUMULAN SOSIAL POLITIK KEAGAMAAN KONSERVATIF DAN MODERNIS 147

A. Sosial Keagamaan-Konservatif	147
B. Sosial Politik-Modernis	153
1. Modernisasi Gaya Hidup Masyarakat	
Arab Saudi	153
2. Kebijakan Modernisasi pada Wanita Arab	
Saudi	158
C. Dilema Ambiguitas Perubahan Kebijakan	167
1. Pergumulan Dua Poros: Antara Wahabi dan	
Kerajaan dalam upaya mewujudkan Islam	
Moderat	167
2. Dilema Antara Konservatisme dan Modernis:	
Tantangan Bagi Para Ulama dan Politisi	
di Arab Saudi	172

BAB V PERUBAHAN SOSIOKULTURAL MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN SOSIAL POLITIK ARAB SAUDI 185

A. Pengaruh kekuasaan Kerajaan Terhadap Perubahan	
Sosial Budaya Masyarakat dan Perkembangan Sosial	
Politik Arab Saudi	185
1. Modernisasi dan Perubahan Sosial Arab Saudi ...	185
2. Pembentukan Komite Anti Korupsi	188
3. Perombakan Jabatan dan Reshuffle Menteri	
Kerajaan	189
B. Konstruksi Perubahan Sosial di Masyarakat	
Arab Saudi	190
1. Budaya Syariah Islam Pasca-Modern	190
2. Melemahnya Peran Polisi Agama Arab Saudi	
(Komite Amar Ma'ruf Nahi Munkar	
Arab Saudi)	193

3. Mendirikan Otoritas Hiburan Umum (<i>hai'ah 'ammah littarfih</i>)	194
4. Membangun Kota Modern	196
5. Membangun dan izin menonton bioskop	197
C. Pengaruh Kebijakan Politik Saudi terhadap Toleransi dan Moderasi Beragama	198
BAB VI PENUTUP	205
A. Kesimpulan	205
B. Saran	210
DAFTAR PUSTAKA	211
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	239



DAFTAR DIAGRAM, TABEL DAN GAMBAR

- Diagram 1.1 Diagram teori otoritas Plato, 18
Diagram 1.2 Diagram teori otoritas Ibnu Taimiyah, 21
Diagram 1.3 Diagram kerangka teori dan konsep,26
- Tabel 2.1 Raja-raja Arab Saudi Modern, 54
- Gambar 2.1 Peta Arab Saudi, 34
Gambar 2.2 Pemimpin-Pemimpin Arab Saudi Modern, 55
Gambar 3.1 Putra Mahkota Muhammad bin Salman, 111
Gambar 4.1 Potret Wanita Saudi di dalam Stadion, 160
Gambar 4.2 Potret wanita mengendarai kendaraan, 161
Gambar 4.3 Potret wanita memberi suara dalam pemilu, 165
Gambar 4.4 Potret wanita mengikuti militer, 166





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otoritas kebijakan dalam suatu negara seringkali melahirkan hal-hal baru baik yang bersifat positif maupun negatif. Hanya saja otoritas yang seringkali muncul di negara-negara berkembang baik di Asia maupun Timur Tengah seringkali melahirkan gejolak karena tidak merefleksikan kebutuhan rakyat dalam menyejahterakan dan meningkatkan pendidikan rakyat maupun dalam pembangunan politik yang lebih bisa diterima oleh masyarakat tersebut. Hal ini bisa dilihat dari kebijakan-kebijakan yang diambil di negara-negara Asia baik Indonesia, Malaysia maupun Myanmar dengan berbagai gejolak yang ada. Demikian juga otoritas-otoritas yang diambil oleh pemerintah atau penguasa di Timur Tengah yang melahirkan gejolak *Arab Spring*¹ seperti yang terjadi di Tunisia, Libya, Yaman dan lainnya.² Di Timur Tengah banyak negara mengalami transisi atau revolusi pemerintahan dikarenakan pemerintah yang diktator, otoriter, dan juga korup. Hal inilah yang kemudian menjadi suatu masalah yang terjadi pada suatu negara. Maka dari itu, penting untuk mengangkat otoritas kebijakan yang diambil selama ini oleh pemerintahan Arab Saudi.

Dalam konteks sosial budaya di Timur Tengah, pemerintahan dengan sistem berpusat merupakan hasil bentukan sejarah yang begitu lama. Hanya saja otoritas-otoritas tersebut seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki tujuan-tujuan tertentu, baik yang bersifat politis, ekonomis, maupun ideologis, sebagaimana yang terjadi di Arab Saudi. Negara Arab Saudi didirikan sebagai suatu bentuk kekuasaan atau kenegaraan yang diakui, kepentingan untuk

¹ Arab Spring secara bahasa bisa diartikan sebagai pemberontakan Arab. Adapun secara istilah adalah gelombang revolusi unjuk rasa dan protes yang terjadi di dunia Arab. Revolusi tersebut bertujuan untuk menggulingkan diktator yang berkuasa di negara-negara Timur Tengah. M. Agastya, *Arab Spring Badai Timur Tengah yang Penuh Darah*, (Jogjakarta: IRCiSod, 2013), 10.

² *Ibid.*, 13.

mewujudkan konservatif-ideologis terlihat begitu nyata yang berpengaruh terhadap banyak kebijakan yang bersifat sosial budaya masyarakat dan kemajuan Arab Saudi. Dengan kondisi demikian, potensi munculnya gejolak politik dipengaruhi oleh sosio-politik dan ideologinya.

Gejolak-gejolak politik yang terjadi seringkali ditunjukkan dengan adanya ketegangan antar negara yang memiliki konflik baik konflik baru ataupun konflik lama yang secara potensial diperkirakan bakal muncul kembali ke permukaan.³ Hal tersebut perlu antisipasi dan penanganan yang baik untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sebagaimana terjadi di negara Arab Saudi beberapa tahun terakhir. Kesadaran tersebut ditunjukkan dengan adanya perubahan bentuk pada otoritas kebijakan yang selama ini terlihat hanya mementingkan kepentingan pihak-pihak tertentu saja dan menghambat kebentingan-kepentingan lain yang lebih prioritas.

Dalam menjalankan otoritas kebijakan, Arab Saudi memiliki sejarah panjang sejak sebelum didirikan sebagai negara yang berdaulat. Orotitas tersebut diawali dengan adanya ikatan kerjasama dan persekongkolan antara Muhammad bin Saud mewakili kekuasaan politik dan Muhammad bin Abdul Wahhab mewakili agama.⁴ Di satu sisi, Ibnu Saud merupakan *amīr* yang cerdas dan juga sangat senang menerima pendakwah. Ibnu Saud seketika memahami bahwa ajaran yang dibawa oleh Ibnu Abdul Wahhab bisa memajukan ambisi-ambisi militernya, ia tidak menyia-nyiakan kesempatan berharga untuk memberi dukungan kepada Ibnu Abdul Wahhab demi meraih kepentingan politiknya.

Namun, di sisi lain Ibnu Abdul Wahhab juga memiliki kepentingan yang juga besar dengan doktrin keagamaan yang dibawanya. Kemudian, ia menyediakan argumentasi-argumentasi teologis nyaris terhadap semua hal yang hendak digapai oleh Ibnu Saud, yakni jihad permanen yang berkaitan dengan perampasan

³ Riza Sihbudi, *Islam, Dunia Arab, Iran, Bara Timur Tengah*, (Bandung: Mizan, 1991), 12.

⁴John L. Esposito, *Unholy War Terror in The Name of Islam*, (New York: Oxford University Press, 2002), 08.

perkampungan-perkampungan dan kota-kota muslim lainnya, mengabaikan khalifah, menetapkan sebuah disiplin yang keras untuk penduduk sendiri dan memaksakan kepada suku tentangga dengan tujuan untuk menyatukan semenanjung tersebut. Ibnu Saud dan Ibnu Abdul Wahhab kemudian membuat sebuah perajanjian dan persetujuan yang selalu mengikat dan selalu dihormati oleh para pengganti mereka selamanya, yakni semangat keagamaan dalam pelayanan ambisi politik, namun tidak sebaliknya.⁵ Melalui kepentingan-kepentingan tersebut pada akhirnya keduanya menyetujui adanya persekutuan bagi kelangsungan berkembangnya Arab Saudi.⁶

Hubungan Ibnu Saud dan Muhammad bin Abdul Wahhab ini selanjutnya menjadi hubungan yang saling menguntungkan dan saling membutuhkan satu sama lain.⁷ Ibnu Saud memperoleh keuntungan politik dari doktrin religiopolitik yang ditawarkan oleh Ibnu Abdul Wahhab, yakni konsep ketaatan mutlak masyarakat pada penguasa. Hal untuk memperkuat posisi Ibnu Saud dihadapan para penguasa wilayah Arab.⁸ Selanjutnya Ibnu Abdul Wahhab bisa terus menyalurkan pemahaman doktrin Pemerintahan Tuhan atau *al-hukūmah al-ilāhiyyah* yakni konsep yang didasarkan pada doktrin kelompok Khawarij klasik yaitu *lā hukma illallāh* atau tidak ada yang berkuasa di alam semesta ini kecuali Allah, karena Dialah satu-satunya sang Pencipta.⁹

⁵Tariq Ali, *The Clash of Fundamentalism, Crusades, Jihads, and Modernity*, diterjemahkan oleh Hordi Ariev dengan judul *Benturan Antarfundamentalis, Jihad Melawan Imperialisme Amerika*, (Jakarta: Paramadina, 2004), 83.

⁶Nur Kholik Ridwan, *Kajian Kritis dan Komprehensif Sejarah Lengkap Wahhabi, Perjalanan Panjang Sejarah, Doktrin, Amaliah, dan Pergulatannya*, (Yogyakarta: IRDiSod, 2020), 53.

⁷Anna Zakiah Drajad, Toni Kurniawan, “Saudi Vision 2030 dan Kebijakan Reformasi pada Kerajaan Arab Saudi”, *Journal Global & Policy*, Vol. 9, No.1, (Januari-Juni 2021): 40.

⁸Mas’odi, “Wahhabisme vis-à-vis Reformasi Arab Saudi: MBS, Agensi, Moderasi, dan Diverifikasi Ekonomi,” *Jurnal Al-Irfan*, Vol. 3, No. 1 (Maret 2020): 53-54.

⁹Muhammad Said Al-Asymawi, *Mu’alim Islam*, 2 ed (Beirut: al-Intishar al-‘Arabi, 2004), 88.

Pada prosesnya otoritas kebijakan Arab Saudi menjadi sangat kaku, konservatif, dan juga sangat agamis. Hal tersebut disebabkan banyaknya narasi agama yang masuk pada kebijakan-kebijakan politik Arab Saudi yang kemudian mewujudkan batasan-batasan yang sulit disentuh oleh pihak kerajaan dan kemudian berdampak pada sosio kultural masyarakat Saudi.¹⁰

Dengan pemberlakuan ajaran agama yang begitu ketat sejak berdirinya sampai awal abad ke-21, masyarakat Arab Saudi selama ini dijauhkan dari kebebasan, kemajuan, terkekang dengan doktrin agama, dan dipandang sebagai negara yang sangat konservatif,¹¹ sehingga Arab Saudi tidak merasakan modernisasi pada waktu yang sangat lama. Seperti pembatasan pada perempuan baik sekedar bersosial maupun berkarir, kemajuan teknologi terbarukan, hiburan, dan juga pariwisata. Beberapa contoh tersebut paling tidak sulit mengalami perubahan selama pemberlakuan doktrin keagamaan yang diusung oleh Wahabbi tetap dijalankan dengan sangat ketat. Kebijakan politik yang awalnya dibangun dengan kerjasama menjadi kebijakan yang dinilai sepihak saja yakni pemberlakuan doktrin agama secara masif, sehingga kebijakannya pun terkesan adanya penguasaan otoritas agama terhadap otoritas kerajaan.

Namun seiring berjalananya waktu, kemajuan zaman di era ini sudah begitu sangat dahsyat. Tentu kemajuan tersebut sangat berkaitan dengan mobilisasi sebuah negara manapun di dunia ini, tanpa terkecuali Arab Saudi. Keinginan sebuah negara untuk menjadi berkembang dan modern, serta mengejar ketertinggalan menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Hal tersebut yang kiranya mulai disadari oleh generasi kerajaan Arab Saudi pada abad ke-21 ini, yakni raja Salman bin Abdul Aziz dengan Pangeran Muhammad bin Salman yang digadang-gadang akan menjadi penerus utamanya.

¹⁰Mas'odi, "Wahhabisme vis-à-vis Reformasi Arab Saudi: MBS, Agensi, Moderasi, dan Diverifikasi Ekonomi,", 53.

¹¹Ani Mariani, "Fenomena K-Pop di Arab Saudi: Pengaruh Reformasi Sosial Terhadap Otoritas Keagamaan," *Jurnal ICEMS*, Vol. 5, No. 1 (Juni 2021): 125.

Bagi pihak kerajaan Saudi saat ini, kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada kemajuan, modernisasi, dan moderasi keagamaan menjadi sesuatu yang pokok dan tidak bisa ditawar-tawar lagi dan sepertinya tidak ada yang bisa menghalangi kebijakan tersebut, meskipun berasal dari kalangan para ulama Wahhabi yang selama ini sudah menjadi mitra utama dalam waktu yang lama. Hal tersebut menjadi tanda bahwa perubahan menuju Arab Saudi yang berwajah baru menemukan titik terang bagi otoritas kerajaan dan juga masyarakat tanpa dibayang-bayangi oleh kekakuan otoritas keagamaan yang selama ini dianggap menghalangi masuknya Islam moderat dan kemajuan di wilayah Arab Saudi.¹² Otoritas kerajaan Arab Saudi mulai menunjukkan pengaruhnya secara lebih terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dan mulai tidak dibatasi dengan otoritas keagamaan. Hal tersebut terlihat dalam keberhasilan otoritas kerajaan Arab Saudi dalam mewujudkan program modernisasi dan reformasi Arab Saudi oleh Pangeran Muhammad bin Salman yang dikenal dengan visi Saudi 2030.¹³

Visi Saudi 2030 merupakan agenda reformasi yang telah resmi diumumkan pada tanggal 25 April 2016 setelah MBS diangkat sebagai putra mahkota kerajaan Arab Saudi.¹⁴ Agenda reformasi tersebut menjadi agenda besar yang bisa jadi merubah pola bentuk otoritas dalam menentukan kebijakan publik, baik yang berkaitan dengan sosial, budaya, dan juga agama. Agenda yang dilakukan oleh MBS ini dianggap sebagai sesuatu yang sangat berani dan beresiko serta mengagetkan banyak pihak baik dari kalangan regional maupun internasional.

Bagi Panji Haryadi, program tersebut di satu sisi menjadi program unggulan bagi otoritas kerajaan dengan membawa harapan besar yakni menjadikan Arab Saudi sebagai salah satu negara

¹²Anna Zakiah Drajad, Toni Kurniawan, “Saudi Vision 2030 dan Kebijakan Reformasi pada Kerajaan Arab Saudi”, 47.

¹³Anis Rosida, “Wacana Modernisasi dalam Tantangan Peradaban, Perang Perempuan dalam Tonggak Sejarah Arab Saudi,” *PALITA: Journal of Social-Religi Research*, Vol. 3, No. 1 (April 2018): 82.

¹⁴Mas’odi, “Wahhabisme vis-à-vis Reformasi Arab Saudi,” 64.

berkemajuan dengan perubahan-perubahan yang dihasilkan pada segala lini kehidupan di Arab Saudi. Namun, kebijakan tersebut juga membawa risiko besar bagi otoritas Arab Saudi di bawah pimpinan MBS, yang mewakili ayahnya. Risiko ini dapat berdampak fatal terhadap kelangsungan otoritas kerajaan jika tidak mampu mengimplementasikan visi yang telah diumumkan dengan jelas.¹⁵

Selain itu, Muhammad Hibatul Wafi memaparkan bahwa dengan adanya penguatan otoritas kebijakan kerajaan yang sudah terjadi, menjadikan perpaduan otoritas antara kerajaan Saudi dan Wahhabi sepertinya semakin memudar. Karena bagi kerajaan, otoritas keagamaan yang diwakili oleh Wahabbi hanya bisa menghalangi tercapainya tujuan reformasi dan modernisasi Saudi tersebut.¹⁶

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa walaupun sejak berdirinya Arab Saudi berpijak pada dua otoritas inti, namun faktanya otoritas keagamaan lebih mendominasi dalam berbagai macam kebijakan publik. Artinya terdapat tumpang-tindih otoritas dan terkesan dimanfaatkan oleh kalangan-kalangan tententu yakni para ulama Wahhabi demi melancarkan penyebaran paham ideologi konservatif mereka. Otoritas kebijakan yang tradisionalis-konservatif yang diambil oleh pemerintah menyisakan persoalan-persoalan, sehingga melahirkan kebijakan-kebijakan yang modernis dan moderat dalam rangka menekan gejolak politik yang terjadi di negara itu, belajar dari konflik sosial politik yang terjadi di negara-negara tetangga di Timur Tengah.

Berangkat dari itu, otoritas kerajaan melalui MBS menyadari bahwa jika terdapat dominasi kuat dari pihak ulama Wahhabi dalam agenda besarnya akan berdampak pada program visi Saudi 2030 yang sudah diresmikan, sehingga perlu adanya penanganan dan penguatan otoritas kerajaan yang kemudian berimplikasi kepada berjalannya visi Saudi 2030 tersebut. Dengan terwujudnya visi Saudi 2030, Arab Saudi

¹⁵ Panji Haryadi, “Perang Muhammad bin Salman terhadap Perubahan Pilar Kenegaraan Arab Saudi,” *Jurnal ICMES*, Vol. 2, No.1 (Juni 2018): 43.

¹⁶ Muhammad Hibatul Wafi, “Diskursus Reformasi Arab Saudi: Kontestasi Kerajaan Saudi dan Wahhabi,” *Islamic World and Politics*, Vol. 2, No.1, (Januari-Juni 2018): 229.

bisa lebih menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan yang diharapkan, seperti kesetaraan, persamaan hak, toleransi, dan modernisasi, serta mengurangi atau bahkan menghilangkan citra Arab Saudi yang selama ini diklaim konservatif menjadi lebih toleran, moderat, dan kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman.

Adapun signifikansi dari penelitian ini adalah lahirnya paradigma modernisme yang moderat, rasional, *equality* sebagai terobosan baru terhadap paradigma lama yang konservatif di Arab Saudi, yang kemudian menjadikan negara-negara di Timur Tengah sebagai negara-negara yang bisa menyesuaikan dengan kemajuan peradaban pada masa sekarang.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dijelaskan di atas, kajian ini berusaha menjawab atau memfokuskan pada beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa otoritas kebijakan Arab Saudi bersifat konservatif dalam pembangunan sosial politik di negara tersebut?
2. Bagaimana implementasi Visi 2030 mempengaruhi paradigma konservatif yang dominan pada masyarakat Saudi dalam upaya modernisasi Arab Saudi pada masa Muhammad bin Salman?
3. Bagaimana pengaruh modernisasi terhadap peralihan Arab Saudi dari Negara dengan kebijakan yang konservatif menuju modernis-moderat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui otoritas kebijakan yang konservatif sebagai ciri dari Negara Arab Saudi dalam kebijakan pembangunan sosial politik di negara tersebut.
- b. Mengetahui implementasi Visi 2030 yang mempengaruhi paradigma konservatif yang dominan pada masyarakat

Saudi dalam upaya modernisasi Arab Saudi pada era Muhammad bin Salman.

- c. Mengetahui pengaruh modernisasi terhadap peralihan Arab Saudi dari negara dengan kebijakan yang konservatif menuju modernis-moderat.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoretis

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini berkontribusi menambah dan memperluas wawasan serta khazanah keilmuan masyarakat, baik dari kalangan akademis maupun masyarakat secara umum dalam studi Timur Tengah khusunya pemerintahan Arab Saudi.

- b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan atau referensi bagi para peneliti, akademisi, dan juga pemerhati Timur Tengah sebagai tambahan informasi dalam mendalami atau meneliti tentang fakta-fakta sosial, agama, politik, dan juga ekonomi dalam konteks studi Timur Tengah.

D. Kajian Pustaka

Secara umum, pembahasan atau penelitian yang menjadikan Arab Saudi sebagai objek utamanya telah banyak dikaji oleh para peneliti terdahulu, baik dari sisi budaya, kebijakan, maupun agama. Paling tidak penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya menjadi kontribusi penting dalam perkembangan studi Islam, khusunya pada kajian Timur Tengah. Namun dari literatur-literatur yang ditemukan, banyak terdapat penelitian yang berhubungan dengan kebijakan luar negeri Arab Saudi baik yang berkaitan dengan ekonomi, dominasi Arab Saudi terhadap negara-negara tetangga, sejarah ideologi Arab Saudi, atau yang berkaitan dengan reformasi Arab Saudi seperti kebijakan yang dikeluarkan pada masa raja Salman. Selain itu, belum banyak sarjana yang mengkaji Arab Saudi dalam hal kaitannya dengan unsur pembentuk otoritas kebijakan yang kemudian berpengaruh

terhadap sosial dan pembangunan politik Arab Saudi, dimana otoritas merupakan faktor utama dalam menentukan arah kebijakan politik baik pada skala regional maupun global.

Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu yang cukup relevan dengan tema kajian ini antara lain: *pertama*, kajian yang dilakukan oleh Muhammad Ari Ramadhan yang berjudul *Kebijakan Luar Negeri Arab Saudi Pasca Diluncurkannya Program “Saudi Vision 2030”*.¹⁷ Kajian tersebut mencoba menjelaskan kebijakan nasional Arab Saudi terkait reformasi ekonomi yang kemudian berpengaruh terhadap politik luar negeri Saudi. Kajian tersebut lebih menekankan pada perkembangan kepentingan ekonomi dan hubungan diplomasi atau kerjasama Arab Saudi dengan negara-negara non-Arab seperti Malaysia, Indonesia, Jepang, China, dan Brunei Darussalam. Kajian ini mencoba memaparkan bahwa Arab Saudi memiliki kebijakan yang lebih dinamis dan lebih terbuka terhadap penerimaan investasi asing demi berlangsungnya visi Saudi 2030, dengan keterbukaan tersebut, artinya Arab Saudi bisa memperoleh “dana segar” dalam mewujudkan reformasi, sehingga Arab Saudi tidak hanya bergantung pada kekayaan minyak yang sudah dimiliki sejak lama yang menjadi penyokong utama ekonomi Saudi.¹⁸ Menurut pemahaman penulis, kajian ini berbeda dengan tema yang penulis teliti, karena fokusnya lebih terbatas pada kebijakan ekonomi dan diplomasi Saudi. Saya menganggap ruang lingkupnya masih terlalu sempit. Tema yang saya teliti dalam disertasi ini berkaitan dengan proses pembentukan otoritas di Arab Saudi dan pengaruhnya terhadap kebijakan pemerintahan, termasuk dalam konteks modernisasi serta struktur sosial dan budaya masyarakat.

Kedua, kajian yang ditulis oleh Fatkhur Roji dengan judul *“Kebijakan Ruang Publik Perempuan: Agenda Politik Double*

¹⁷Muhammad Ari Ramadhan, *Kebijakan Luar Negeri Arab Saudi Pasca Diluncurkannya Program Saudi Vision 2030*, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021).

¹⁸Mas’odi, “Wahhabisme vis-à-vis Reformasi Arab Saudi,” 65.

Interest Saudi".¹⁹ Tulisan tersebut mencoba menjelaskan adanya perbedaan atau perubahan terhadap sepak terjang perempuan di ranah publik, khususnya dalam hal berkendara. Di era sebelumnya berkendara bagi perempuan merupakan sesuatu yang dilarang oleh otoritas pemerintah atau hanya boleh bepergian jika ditemani oleh *mahram* atau saudara,²⁰ tetapi dengan adanya agenda politik Arab Saudi terkait dengan kepentingan ekonomi dan keamanan, saat ini, perempuan diperbolehkan untuk mengemudikan kendaraan. Kajian ini, menganggap bahwa perubahan peraturan tersebut merupakan sebuah kepentingan politik kerajaan untuk mencapai reformasi atau peningkatan perekonomian maupun dalam menjaga kedaulatan negara yang bertujuan untuk memperteguh ketahanan kerajaan dari berbagai konflik.²¹ Hal tersebut menjelaskan bahwa adanya pembolehan perempuan untuk mengemudi kendaraan hanya dianggap sebatas pengalihan isu yang dilakukan oleh kerajaan Saudi demi kedua tujuan tersebut, sehingga penataan kembali hubungan politik internasional Arab Saudi berjalan dengan baik dan bisa menutupi kelemahan-kelamahan yang ada dalam pemerintahan.²² Kajian ini juga berbeda dengan tema disertasi yang hendak dikerjakan, walaupun kebijakan terhadap perempuan juga nantinya menjadi bagian kecil dalam pembahasan penelitian penulis. Namun, cakupannya lebih luas dan tidak terbatas pada satu atau dua isu tentang perempuan Arab Saudi.

Ketiga, kajian yang dilakukan oleh Hasbi Anwar yang berjudul "*Peran Ulama dalam Kebijakan Pemerintah Saudi: Studi Kasus Kontraterorisme dan Fenomena Arab Spring*".²³ Kajian ini menjelaskan bahwa peran ulama dan mufti Arab Saudi memiliki andil

¹⁹ Fatkhur Roji, "Kebijakan Ruang Publik Perempuan: Agenda Politik Double Interest Saudi", *International Journal Ihya 'Ulum Al-Din*, Vol. 19, No. 2, (2017).

²⁰ Imam Bin Hajar, "Reinterpretasi Hukum Larangan Bepergian Tanpa Mahram Bagi Perempuan", *Al Manahij*, Vol. 6, No. 1 (2012).

²¹ Fatkhur Roji, "Kebijakan Ruang Publik Perempuan," 281.

²² Fatkhur Roji, "Kebijakan Ruang Publik Perempuan," 280-281.

²³ Hasbi Anwar, *Peran Ulama dalam Kebijakan Pemerintah Saudi; Studi Kasus Kontraterorisme dan Fenomena Arab Spring*, (Tesis: Universitas Gajah Mada, 2013)

yang cukup besar terhadap sejarah otoritas politik di negara tersebut, meskipun pada dasarnya mereka tidak secara langsung terlibat dalam proses pembentukan kebijakan yang diberlakukan baik dalam skala regional maupun global. Namun, kemampuan ulama dan mufti Saudi dalam mempengaruhi publik dengan otoritas agama yang dimiliki dan dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan sangat berdampak pada masyarakat Arab Saudi dalam bertindak dan berfikir. Walaupun pemerintah Saudi gencar mewacanakan modernisasi, namun kekuatan ulama dan mufti dalam mengendalikan opini publik dianggap masih bertahan. Hal tersebut bisa jadi karena isu-isu tentang terorisme dan pemberontakan masih banyak terjadi, sehingga perlu dikeluarkan fatwa untuk melawan dan menindas teror dalam bentuk apapun. Kajian ini juga berbeda dengan disertasi yang hendak penulis teliti. Penulis menganggap bahwa pengaruh ulama terhadap kebijakan politik dalam penelitian ini lebih pada respons mereka terhadap gejolak *Arab Spring* yang melanda Timur Tengah dan menghindari ketidakstabilan politik di Arab Saudi, dimana pasca terjadinya *Arab Spring*, terdapat beberapa agenda demonstrasi yang memaksa perubahan pada pemerintahan Saudi dan atas dasar tersebut perlu dikeluarkannya fatwa takfir bagi pihak-pihak yang besangkutan.²⁴ Adapun dalam kajian disertasi ini, nantinya lebih tertuju pada otoritas Arab Saudi dari segi historis yang kemudian dari waktu ke waktu berdampak pada pembangunan kebijakan politik Arab Saudi.

Keempat, kajian yang ditulis oleh Sainul Rahman dengan judul “*Arab Saudi Baru; Visi 2030, Reformasi, dan Wahhabisme*”.²⁵ Kajian ini menjelaskan bahwa hubungan erat antara ideologi Wahhabi dan Bani Saud merupakan perpaduan dalam membentuk kebijakan dan mempertahankan eksistensi kerajaan dan pemerintahan Arab Saudi. Hingga saat ini, keduanya dianggap sebagai unsur utama dalam pembentukan kebijakan politik yang kemudian melatarbelakangi adanya reformasi Arab Saudi yang tertuang dalam program visi Saudi

²⁴ Hasbi Anwar, *Peran Ulama dalam Kebijakan Pemerintah Saud*”, 99-101.

²⁵ Sainul Rahman, *Arab Saudi Baru; Visi 2030, Reformasi, dan Wahhabisme*, (Tesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

2030. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa terdapat hubungan simbiosis antara keduanya yang tertuju pada kekuatan pengaruh terhadap opini publik dan kondisi sosial masyarakat. Pembahasan pada kajian ini lebih tertuju pada beberapa bentuk reformasi yang disebabkan visi Saudi tersebut selain juga menyinggung tentang kondisi ekonomi negara yang mulai melepas ketergantungannya dari kekayaan minyak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Buzan bahwa negara yang menjadikan minyak sebagai sumber daya utama ekonominya bisa lebih rentan mengalami gejolak atau ancaman ekonomi. Karena jika sumber daya tersebut sudah tidak berjalan, maka secara otomatis bisa menimbulkan dampak terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi, dan juga keamanan pada negara tersebut.²⁶

Kelima, kajian yang ditulis oleh Fawaid Abrari dengan judul *“Perubahan Budaya Arab Saudi Era Kepemimpinan Raja Salman dalam Perspektif Kajian Unsur-unsur Budayanya”*.²⁷ Kajian tersebut menjelaskan silsilah kerajaan Arab Saudi dan berfokus pada kiprah raja Salman bin Abdul Aziz dalam perubahan budaya Arab Saud serta adanya perubahan budaya di Arab Saudi yang berlangsung dengan cepat pada era raja Salman yang disebabkan oleh berkembang pesatnya teknologi komunikasi dan informasi yang menembus pertahanan ideologi agama Arab Saudi. Dengan berkembangnya teknologi tersebut membuat masyarakat Arab Saudi lebih mudah menangkap atau menyerap nilai-nilai budaya dari luar, sehingga dengan demikian, pada masa kempimpinan raja Salman terdapat penyesuaian kebijakan yang lebih mengarah kepada penerimaan terhadap sebuah perbedaan masyarakat Saudi. Artinya, penyesuaian tersebut merupakan hal baru dan dianggap wajar, karena hal tersebut menjadi tuntutan atau kebutuhan pokok pada masa sekarang dan

²⁶ Panji Haryadi, “Perang Muhammad bin Salman terhadap Perubahan Pilar Kenegaraan Arab Saudi, 40.

²⁷ Fawaid Abrari, *Perubahan Budaya Arab Saudi Era Kepemimpinan Raja Salman dalam Perspektif Kajian Unsur-unsur Budayanya*, (Tesis: Uivesitas Gajah Mada Yogyakarta, 2019).

berpengaruh terhadap kebijakan demi kemajuan Negara Saudi.²⁸ Lebih lanjut penelitian ini lebih mengarah pada faktor-faktor perubahan budaya Arab Saudi baik secara internal maupun eksternal.

Keenam, kajian yang ditulis oleh Moh Wildan Alfaruk dengan judul “*Dinamika Keagamaan, Sosial, Politik Arab Saudi dan Visi 2030 Muhammad bin Salman: Analisis Teori Perubahan Sosial dan Modernisasi*”.²⁹ Kajian ini menjelaskan tentang pengaruh visi 2030 Arab Saudi yang digaungkan oleh Muhammad bin Salman terhadap dinamika pola kehidupan masyarakat Saudi. Wildan menambahkan bahwa visi 2030 Arab Saudi yang mulanya ditujukan hanya untuk memperbaiki ekonomi Arab Saudi, namun pada akhirnya banyak hal yang terdampak oleh kebijakan tersebut. Titik tekan pada kajian tersebut terbatas pada visi 2030 Arab Saudi dan korelasinya terhadap sosial dan keagamaan. Yang menjadi pembeda dari kajian yang penulis lakukan adalah bahwa pembentukan Arab Saudi yang modernis dan menuju perubahan merupakan gerakan yang tidak sebentar dan diawali oleh kesadaran otoritas pihak kerajaan Arab Saudi dari adanya otoritas lama yang dianggap akan merugikan di masa depan. Dari sudut pandang itulah penulis melakukan kajian pada disertasi ini.

Ketujuh, kajian yang ditulis oleh Faiq ‘Ainurrofiq dengan judul “*Daur al Mar’ah fī al-Qita’ al-Ām; Bainā Fatāwā al-‘Ulamā’ as-Su’ūdiyyīn wa Ru’yah al-Mamlakah al-‘Arabiyyah as-Su’ūdiyyah* 2030.³⁰ Kajian tersebut menjelaskan tentang bagaimana sosok dan peran perempuan menjadi perhatian yang begitu besar dalam fatwa-fatwa ulama Arab Saudi dan dalam visi pemerintah Arab Saudi 2030. Keduanya digambarkan dengan adanya perbedaan kebijakan atau

²⁸ Selvia Santi, “Studi Karakteristik Perkembangan Sains di Iran, Arab Saudi, dan Mesir (1950-2000),” *Proseding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains*, Vol. 1, (September 2018): 181-182.

²⁹ Moh Wildan Alfaruk, *Dinamika Keagamaan, Sosial, Politik Arab Saudi dan Visi 2030 Muhammad bin Salman: Analisis Teori Perubahan Sosial dan Modernisasi*, (Tesis: UIN Sunan Kalijaga, 2022).

³⁰ Faiq ‘Ainurrofiq, *Daur al-Mar’ah fī al-Qita’ al-Ām; Bainā Fatāwā al-‘Ulamā’ as-Su’ūdiyyīn wa Ru’yah al-Mamlakah al-‘Arabiyyah as-Su’ūdiyyah* 2030, (Disertasi: UIN Sunan Kalijaga, 2022).

fatwa yang dikeluarkan dimasa lalu dan masa sekarang. Ulama Arab Saudi dimasa lalu menilai perempuan dari sudut pandang agama saja sehingga kebijakan yang dikeluarkan terkait perempuan terkesan lebih kaku dan ada pembatasan. Namun, dengan sudut pandang yang berbeda, pemerintah Arab Saudi menilai perempuan sebagai agen perubahan yang melakukan pergerakan pada berbagai sektor baik ekonomi dan sumber daya manusia. Dengan kata lain, Visi 2030 pemerintah Saudi memiliki pengaruh besar terhadap keberadaan perempuan saat ini dengan mengubah atau meninggalkan fatwa-fawa lama dari ulama Saudi. Kajian tersebut tentu penulis anggap berbeda dari apa yang ditulis pada disertasi ini. Kajian tersebut cakupannya lebih ditekankan pada tema perempuan dalam konteks Arab Saudi, sedangkan dalam disertasi ini cakupan perempuan hanya menjadi bagian kecil saja dan cakupan pada disertasi ini lebih luas yakni adanya perubahan otoritas, modernisasi, juga perubahan kebijakan, serta sosial budaya masyarakat Saudi.

Berdasarkan dari hasil bacaan terhadap beberapa literatur, penulis belum menemukan kajian yang membahas tentang Arab Saudi dalam kaitannya dengan otoritas Saudi yang membangun kebijakan politik baik dalam maupun luar negeri yang kemudian menyebabkan perubahan otoritas di negara tersebut. Oleh sebab itu, penelitian ini ingin mencoba mengeksplorasi aspek sosio-historis tentang otoritas baik dari segi aktor maupun faktor-faktor pembentuk otoritas pemerintahan Saudi. Sehingga dengan otoritas tersebut, Arab Saudi mencoba melangkah pada sesuatu yang berbeda dari perilaku lama yakni tradisional konservatif menuju perilaku baru yang lebih moderat dan modern dalam membangun kebijakan politik sebagaimana yang telah penulis rumuskan dalam rumusan masalah penelitian ini.

E. Kerangka Teoretis

Otoritas pemerintahan Arab Saudi, melalui program reformasi dan modernisasi, telah menjadi penentu utama perubahan dalam sosial budaya masyarakat Saudi yang semula konservatif dan tradisionalis, kini menjadi lebih terbuka dan dinamis. Perubahan tersebut dengan sendirinya merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari dan menjadi

sesuatu kewajaran dalam kehidupan manusia. Oleh karenanya, kehidupan manusia selalu mengalami dinamika perubahan sebagai konsekuensi dari hubungan antar manusia di masyarakat.³¹ Hal ini menunjukkan bahwa kontekstualisasi kebijakan dalam membentuk masyarakat yang berkemajuan dan jauh dari ketertinggalan menjadi hal sangat penting pada abad ke-21 ini. Di mana aliansi elit yang selama ini berasal dari perpaduan antara pihak kerajaan dan pihak ulama menjadi berubah³² karena tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Pada prosesnya fenomena Arab Saudi bisa menjadi gambaran bahwa kebijakan bisa berasal atau berdasarkan kekuasaan terhadap politik atau agama, atau salah satunya hanya menjadi kosmetik atau pelengkap saja.³³

Diskursus otoritas di negara Arab Saudi tentunya sangat dipengaruhi oleh sejarah perkembangan negara tersebut sejak didirikan pertama kali. Pada prosesnya, otoritas yang ada sangat menentukan arah pembangunan kebijakan politik Arab Saudi. Untuk menelusuri otoritas dan konteks perubahan sosial dan modernisasi serta moderasi yang disebabkan otoritas penguasa Arab Saudi, dalam penelitian ini setidaknya penulis menggunakan beberapa teori sebagai berikut:

1. Teori Otoritas Plato dan Bin Taimiyah

a. Otoritas Plato

Jika berbicara tentang otoritas, maka di saat yang sama juga akan membicarakan hal yang berhubungan dengan politik kekuasaan. Politik kekuasaan merupakan suatu fungsi hubungan antara penguasa dan yang dikuasai,³⁴ dalam era sekarang sering

³¹Setiyo Yuli Handoyo, “Transformasi Sosial Desa Adat menjadi Desa Wisata Edelweis: Perspektif Teori Strukturisasi Anthony Giddens”, *Agribusiness Journal*, Vol. 13, No. 2 (2019): 54.

³²Ani Mariani, “Fenomena K-Pop di Arab Saudi; Pengaruh Reformasi Sosial terhadap Otoritas Keagamaan, *Jurnal ICMES*, Vol. 5, No. 1 (Jun 2021): 131.

³³Asghar Ali Engineer, *Islam and Liberation Theology*, terj. Agung Prihantoro, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 79.

³⁴David E. After, *Pengantar Analisa Politik*, Ter. Setiawan Abadi (Jakarta: LP3ES, 1985), 51.

dikenal dengan pemerintahan. Sebuah pemerintahan bisa jadi dijalankan oleh satu orang saja seperti raja, diktator, dan juga otokrat, atau bisa jadi juga dijalankan oleh beberapa orang.³⁵ Berjalannya sebuah pemerintahan sejatinya bisa memunculkan kemungkinan-kemungkinan buruk atau baik. Setiap pemerintahan tersebut juga merupakan uji coba untuk menemukan sesuatu yang bisa mendatangkan kebijakan atau kemakmuran. Jika uji coba tersebut baik, maka yang didapatkan adalah kebijakan. Namun, jika tidak baik, maka yang akan didapatkan adalah adanya kekerasan, kekecewaan, dan juga korupsi.

Plato mengatakan bahwa orang-orang yang memiliki kapasitas luar biasa untuk bernalar secara benar adalah mereka yang pantas diberikan hak untuk menjalankan pemerintahan. Bernalar merupakan syarat utama bagi politik dan keadilan dengan kemakmuran sebagai tujuan utamanya. Oleh karenanya kompetensi seseorang yang memiliki wewenang atau otoritas merupakan kewajiban yang melekat dan harus benar-benar bagus, sehingga terciptalah suatu keseimbangan antara penguasa dan yang dikuasai.

Pemerintah yang stabil tersebut selanjutnya bisa menghasilkan kepuasan masyarakat. Masyarakat yang merasa puas bisa merasa nyaman untuk bekerja sehingga menghasilkan sumber daya manusia atau alam bagi keberlangsungan pemerintahan yang stabil, tertib, dan selaras.³⁶ Hal tersebut yang perlu dilakukan oleh pemerintahan-pemerintahan sampai masa sekarang.

Bagi Plato, keadilan merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawarkan lagi untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan baik yang mesti dijalankan oleh sebuah pemerintahan. Pembacaan Plato pada dasarnya diawali oleh kekalahan Athena oleh Sparta pada perang Peloponnesia (431-404 SM) yang

³⁵Frederick Copleston, *Filsafat Plato*, Terj. Atolah Renanda Yafi (Yogyakarta: Basabasi, 2020), 246.

³⁶David E. After, *Pengantar Analisa Politik*, 54.

kemudian memunculkan pertanyaan bagaimana suatu kerajaan yang begitu besar dengan perkembangan dan kecerdasan yang baik bisa mengalami kegagalan. Jawabannya adalah karena pengetahuan yang kritis dan kebijaksanaan yang dibutuhkan tidak disalurkan secara merata kepada masyarakat. Oleh karena itu, penopang masyarakat menjadi berkurang.

Bagi Plato, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana membangun suatu masyarakat yang semuanya bisa menyumbang terhadap kemakmuran dan setiap orang mengeluarkan potensinya tanpa adanya tekanan dari komunitas-komunitas yang merusak. Jawabannya adalah dengan menggabungkan antara pencapaian kebesaran orang-orang Athena dengan penerapan metode yang digunakan oleh Sparta, sehingga kerusakan menjadi terhindarkan dan keadilan bisa mewujudkan sebuah keharmonisan abadi.

Pada model pendistribusian antara penguasa dan yang dikuasai, Plato menggambarkan bahwa dengan kecerdasan yang dimiliki, para penguasa memiliki hak untuk menggunakan kekuasaanya demi mencapai kebaikan publik yang disebut dengan wewenang yang berkeadilan. Kemudian kebaikan publik tersebut menjadi pemenuhan terhadap setiap potensi pada setiap orang di dalam masyarakat. Selanjutnya, potensi yang ada bisa menghasilkan lapangan kerja bagi masyarakat. Pada gilirannya, pemerataan kerja yang didapatkan oleh masyarakat bisa menumbuhkan sumber-sumber daya manusia atau alam yang juga sangat berpengaruh atau bahkan dibutuhkan oleh penguasa selaku pemegang otoritas dalam menentukan sebuah kebijakan baru yang lebih baik.³⁷

³⁷ David E. After, *Pengantar Analisa Politik*, 59.

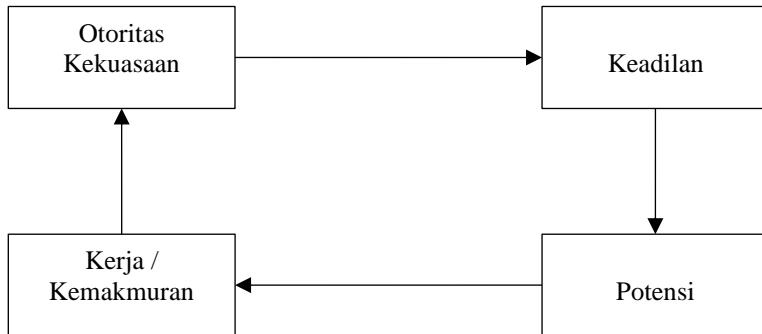


Diagram 1.1: Teori Otoritas Plato

David E. After (59)

Pentingnya teori otoritas Plato dalam konteks penelitian terhadap otoritas di Arab Saudi mencakup kontribusinya dalam merangkul kebijaksanaan yang berasal dari pengetahuan dan refleksi rasional. Di Arab Saudi, dimana otoritas seringkali terkait dengan interpretasi agama dan tradisi yang kaku, teori Plato menyoroti perlunya kritisisme rasional terhadap keputusan-keputusan otoritatif. Teori ini menekankan bahwa otoritas yang sah tidak semata berasal dari kekuatan atau tradisi, tetapi juga dari pemahaman yang mendalam dan pertimbangan yang bijak terhadap kebenaran serta kesejahteraan bersama. Dengan menggunakan kerangka teoritis ini, penelitian terhadap otoritas di Arab Saudi dapat mengeksplorasi dinamika antara keteguhan nilai-nilai tradisional dengan tuntutan modernisasi yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang secara lebih inklusif dan adaptif terhadap perubahan global.

b. Otoritas Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah memiliki pandangan bahwa salah satu hal terpenting dalam agama adalah mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Hal tersebut tidak bisa terwujud kecuali dengan adanya sebuah lembaga yang dikenal dengan pemerintahan atau negara sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan, sehingga dengan demikian dibutuhkanlah seorang pemimpin dalam mengatur kehidupan

sosial masyarakat dan memiliki kualitas yang baik dan rasa tanggung jawab yang besar.³⁸ Adanya seorang pemimpin yang dipatuhi oleh rakyatnya, selain untuk mewujudkan kesejahteraan umat, juga mengatur sebuah kerja sama dan tolong menolong bagi seluruh lapisan masyarakat dari yang memimpin dengan otoritasnya sampai yang dipimpin dengan kepatuhannya.³⁹

Dalam sebuah kepemimpinan atau bagi seseorang yang menduduki jabatan tertentu sangat dianjurkan memiliki kualitas pemimpin yakni otoritas dan amanah (dapat dipercaya). Kedua hal tersebut bisa mengantarkan seorang pemimpin menjadi bagian dari lembaga yang menentukan keberhasilan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Selain itu, bahwa seorang pemimpin dengan otoritas yang dimilikinya harus mencerahkan daya upayanya baik tenaga maupun pikiran untuk memperbaiki kondisi spiritual dan sosial masyarakatnya. Bagi Ibnu Taimiyah, pemimpin yang demikian dapat disebut seorang mujahid yang utama.⁴⁰

Dengan adanya kepemimpinan yang memiliki otoritas dan kejujuran yang baik, maka seorang pemimpin lebih mudah menerapkan dan menjalankan hukuman dan hak bagi masyarakat yang dipimpinnya. Karena hal itu menjadi tugas utama seorang pemimpin.⁴¹ Penegakan hukum dan hak tersebut harus ditanggung dan ditegakkan oleh pemerintah dengan dilandasi kesadaran diri yang tinggi dan diberlakukan atas dasar keadilan dan tanpa pandang bulu pada seluruh lapisan masyarakat. Artinya baik bangsawan, saudagar kaya, bahkan

³⁸ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2010), 33.

³⁹ Ibnu Taimiyah, *Majmū' ar-Rasā'il al-Kubrā*, (Kairo: Maktabah al-Misriyah, 1322 H), Vol. I, 36.

⁴⁰ Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah Etika Politik Islam*, Ter. Rofi' Munawwar, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 21.

⁴¹ Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 196.

yang ada pada lapisan bahwa sekalipun, bisa mendapatkan ganjaran dan hak yang sama jika melakukan sesuatu yang dianggap menyimpang.⁴² Tujuan penegakan hukum secara merata tersebut bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan prinsip mengambil sebuah kemanfaatan dan menghindari kejahanatan dan kerusakan.⁴³

Poin selanjutnya yang menjadi penting dalam pemikiran Ibnu Taimiyah selain otoritas pemimpin dan penegakan hukum adalah adanya keadilan dalam mencapai sebuah kemaslahatan atau kebaikan kolektif yang bisa dirasakan oleh semua masyarakat. Keadilan dan kemaslahatan merupakan dua hal yang juga pokok dan sangat fundamental dalam tubuh pemerintahan atau sebuah negara. Asas keadilan tidak hanya menjadi landasan moral atau etika semata, melainkan harus teraplikasikan dalam setiap praktik penyelenggaraan sebuah pemerintahan atau negara,⁴⁴ sehingga sifat adil dalam menentukan sebuah kebijakan dalam pemerintahan menjadi kekuatan atau otoritas dalam penerapannya di tengah masyarakat.

Selain menjalankan amanah dan penegakan hukum yang berkeadilan tersebut, Ibnu Taimiyah menjadikan musyawarah sebagai sebuah kebutuhan utama bagi sebuah pemerintahan atau *waliy al-amri*, karena musyawarah adalah salah satu perintah Allah SWT. yang selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di kalangan para sahabatnya untuk menarik simpati dan melunakkan hati para sahabat serta agar diteladani oleh para generasi selanjutnya.⁴⁵ Dengan adanya musyawarah, sebuah pemerintahan lebih mudah dalam mengidentifikasi sebuah masalah dan menemukan cara terbaik dalam mencari solusinya di samping juga lebih mudah dalam memunculkan ide-ide

⁴²Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah*, 61-64.

⁴³ Jeje Abdul Rojak, *Politik Kenegaraan Pemikiran-Pemikiran Al-Ghazali dan Bin Taimiyah*, (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1999), 28.

⁴⁴ *Ibid*, 129.

⁴⁵ Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah*, 153.

brilian dari para anggota pemerintahan yang terlibat, sehingga segala sesuatu yang dihadapi dengan musyawarah bisa terselesaikan dengan lebih terstruktur, terukur dan juga terarah.

Unsur-unsur tersebut merupakan kunci pokok dalam mencapai terciptanya masyarakat yang sejahtera dan mendapatkan kemaslahatan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Semua itu harus dijalankan bersama oleh pemerintahan dengan segala hal yang melengkapinya atau seluruh jajaran yang terlibat di dalamnya dalam upaya menggapai tujuan kemaslahatan tersebut. Dengan demikian, negara merupakan sebuah kesadaran organis di mana setiap anggotanya memiliki kewajiban untuk berpartisipasi sesuai dengan fungsinya masing-masing dan melaksanakan kewajiban tersebut dengan sebenar-benarnya. Oleh karena itu, dengan kebersamaan atas fungsional yang dijalankan, kemaslahatan masyarakat bisa terwujud pada setiap lapisannya.



Diagram 1.2: Teori Otoritas Ibnu Taimiyah

Serapan Penulis dari *As-Siyāsah asy-Syar'iyyah fī Islāhi Rā'i wa Ra'iyyah li Ibni Taimiyah*

2. Teori Modernisasi

Wacana modernisasi di negara Islam merupakan kajian yang seringkali tidak mudah dijelaskan. Hal tersebut dikarenakan adanya kekuatan otoritas agama yang seakan membelenggu pemangku otoritas dengan pemberlakuan hukum Islam secara ketat, sebagaimana yang ada di Arab Saudi. Namun, memasuki periode abad ke-21, Arab

Saudi membuka potensi untuk menjadi negara yang tidak berbeda dengan negara-negara maju lainnya. Dengan wacana dan pemberlakuan modernisasi, Arab Saudi menjadi negara Islam yang bisa dikatakan mengubah pola kehidupan sosial dan budaya masyarakat dengan sangat ekstrim dan tidak butuh waktu yang lama. Hal ini karena modernisasi merupakan salah satu bentuk perubahan sosial yang sangat nyata.⁴⁶

Selain itu, modernisasi juga merupakan suatu transformasi kehidupan masyarakat yang tradisional menuju ke arah bentuk ekonomis dan politis sebagaimana negara-negara Barat⁴⁷ yang dianggap stabil. Transformasi tersebut tujuannya adalah ingin menyerupai kemajuan dunia Barat yang lebih makmur dan berkemajuan dalam bidang ekonomi, teknologi, atau bidang lainnya.⁴⁸ Hal tersebut berdasarkan asumsi bahwa sistem tradisional tidak mampu membawa atau menciptakan level tinggi dalam mengembangkan sebuah teknologi, artinya tidak ada aktivitas kemajuan, produktivitas yang baik dan tidak menumbuhkan kreativitas pada sistem tersebut.⁴⁹

Dalam melihat fenomena di Arab Saudi, penulis juga mencoba mengkaji menggunakan teori modernisasi yang dikembangkan oleh Evsey Domar dan Roy Harrod yang sering dikenal dengan teori Harrod-Domar. Keduanya bekerja hampir secara bersamaan untuk mengembangkan teori ini.⁵⁰ Menurut pandangan teori Evsey Domar

⁴⁶ Elly Rosana, “Modernisasi dalam Perspektif Perubahan Sosial,” *Al-Adyan*, Vol. X, No. 1 (Januari-Juni 2015): 68.

⁴⁷ Barat merujuk kepada negara-negara yang berada di benua Eropa, Amerika, dan Australasia. Negara-negara tersebut sering disebut dengan negara dengan mayoritas penduduk berkulit putih. Nadilla Syabriya, “Apa yang Disebut dengan Negara Barat, Ini Daftar Negaranya,” 22 September 2022, diakses 29 April 2024, <https://news.okezone.com/read/2022/09/28/18/2676767/apa-yang-disebut-dengan-dunia-barat-ini-daftar-negaranya>.

⁴⁸ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004), 153.

⁴⁹ Anis Rosida, “Wacana Modernisasi dalam Tantangan Peradaban, Perang Perempuan dalam Tonggak Sejarah Arab Saudi,” 86.

⁵⁰ Pavitar Parkash Singh, *Economics of Growth and Development*, (New Delhi: USI Publications, t.t.), 33.

dan Roy Harrod, modernisasi berkaitan erat dengan perubahan pembangunan suatu bangsa atau wilayah. Model pembangunan tersebut didasari pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh ketersediaan modal. Asumsi dasarnya adalah permasalahan modernisasi pembangunan pada dasarnya merupakan masalah penambahan investasi dan modal. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi.⁵¹ Apabila tabungan dan investasi pada wilayah atau negara tersebut tergolong rendah, maka pertumbuhan ekonominya pun juga tergolong rendah. Sebaliknya jika investasi suatu negara dianggap berkembang baik, maka pertumbuhan ekonominya juga menjadi baik, sehingga modernisasi menjadi sesuatu yang mudah untuk dicapai.

Modernisasi dengan tipe tersebut bisa dijumpai pada negara-negara berkembang atau negara yang sudah maju, Arab Saudi bisa diambil sebagai contoh pada kategori ini. Pada wilayah tersebut, negara atau masyarakatnya memiliki investasi yang cukup tinggi yakni ditunjukkan dalam bentuk saham, indeks, dan atau dalam bentuk investasi lainnya dari pihak asing.⁵² Teori ini menjadi penting dalam melengkapi kajian yang penulis lakukan, mengingat bahwa Arab Saudi merupakan negara maju dengan ciri khas keislamannya yang begitu kaku dan konservatif, namun pada beberapa waktu belakangan menjelma menjadi negara yang haus kemajuan dan kepentingan ekonomi, dengan mengkampanyekan reformasi dalam bentuk Visi Saudi 2030 oleh putra mahkota yakni Muhammad bin Salman. Dampak dari reformasi tersebut adalah selain banyaknya investor asing masuk pada negara tersebut, perubahan pola hidup masyarakatnya pada tataran sosial dan budaya semakin tidak terhindarkan. Dengan perubahan tersebut Arab Saudi menjadi negara Islam dengan fenomena yang cukup menarik dan membawa wajah baru pada kajian keislaman.

⁵¹ Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), 19.

⁵² Teguh Imam Rahayu, "Teori Pembangunan Dunia Ketiga dalam Teori Modernisasi Sub Teori Harrod-Domar (Tabungan dan Investasi)," *Gema Eksos Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, Vol. 06, No. 01 (2010): 74.

3. Teori Struktural Anthony Giddens

Untuk melihat konstruksi perubahan sosial pada masyarakat Saudi, selain menggunakan kedua teori yang sudah disebutkan sebelumnya, penulis juga menggunakan teori konstruksi sosial yang dikembangkan oleh Anthony Giddens yang dikenal dengan teori Strukturalis. Pada realitasnya, perubahan sosial pada masyarakat sebagaimana yang terjadi di Arab Saudi, terbagi menjadi dua bentuk, yakni perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan.⁵³ Salah satu contoh dari perubahan atas tindakan sosial yang direncanakan adalah fenomena yang terjadi di Arab Saudi.

Dalam pemahaman teori Anthny Giddens, tindakan sosial sebagai suatu reaksi aktor dalam merespon fenomena sosial merupakan suatu yang muncul dari dua faktor utama, yakni wujudnya seorang aktor atau agen dan adanya struktur sosial di mana aktor berada.⁵⁴ Menurut Giddens, realitas sosial dapat dipahami dengan baik dan utuh jika perilaku aktor dan struktur dihubungkan dengan baik. Keduanya saling mempengaruhi dan mempunyai signifikansi yang serupa dalam terjadinya sebuah tindakan, sehingga keduanya tidak bisa dinafikan dalam membaca realitas sosial pada masyarakat.⁵⁵ Karena keduanya menjadi inti terhadap setiap penelitian yang berhubungan dengan ilmu sosial dan juga sejarah.⁵⁶

Dalam teorinya, Giddens menghubungkan antara struktur dan tindakan sosial dalam relasi agensi, yang kemudian mewujudkan praktik sosial dalam kehidupan masyarakat yang terbentuk secara

⁵³ Setiyo Yuli Handoyo, "Transformasi sosial Desa Adat Menjadi Desa Wisata Edelweis; Perspektif Teori Strukturalis Anthony Giddens," *Agribusiness Journal*, Vol. 13. No, 2 (2019): 55.

⁵⁴Nirzalin, "Mendamaikan Aktor dan Struktur dalam Analisis Sosial Perspektif Teori Strukturalis Anthony Giddens," *Jurnal Sosiologi Universitas Syiah Kuala*, Vol. 3, No. 3 (Juni 2013): 15. Lihat juga Anthony Giddens, *Teori Strukturalis; Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Manusia*, Terj. Maufur & Daryanto, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 25.

⁵⁵*Ibid.*, 18.

⁵⁶George Ritze dan Douglas J. Googman, *Teori Sosiologi; Dari Teori Sosiologi Klasik Hingga Perkembangan Murakhir*, Terj, Nurhadi, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), 568.

tersusun dan terstruktur, bukan secara kebetulan.⁵⁷ Dalam hal ini seorang agen memiliki kemampuan untuk menciptakan perbedaan pada dunia sosial. Bisa jadi seorang agen adalah orang yang memiliki kekuasaan, karena tanpa kekuasaan seorang agen tidak bisa memiliki kualifikasi dalam menciptakan perbedaan atau perubahan dan mencampuri rangkaian peristiwa menuju pada sebuah perubahan.⁵⁸ Baginya, konsep kekuasaan adalah kemampuan transformatif yang bisa dimanfaatkan dan digunakan untuk memengaruhi orang lain atau kekuasaan-kekuasaan yang dijalankan orang lain.⁵⁹

Konsep Giddens ini digunakan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan atas perubahan sosial yang diharapkan. Konsep ini memberikan paradigma baru bahwa belum tentu strukturlah atau sebaliknya agenlah yang berpengaruh dan dominan terhadap praktik kehidupan sosial pada masyarakat, dalam konteks bahwa keduanya bersifat dualitas. Dualitas keduanya terletak pada proses di mana struktur sosial merupakan hasil dan sekaligus sarana praktik sosial,⁶⁰ sehingga untuk memahami fenomena sosial, seseorang harus menggali motivasi sang aktor atau agen dan pemahamannya, sekaligus menggali struktur sosial yang mendasari lahirnya tindakan baru atau yang berbeda dari mereka baik yang berkaitan dengan politik, sosial, budaya maupun tindakan lainnya, begitu juga dalam memahami dan membaca fenomena perubahan baru yang terjadi di Arab Saudi.

Pada diagram di bawah ini penulis gambarkan bahwa di satu sisi Arab Saudi merupakan negara yang menjadi pusat agama Islam dengan sejarah yang melingkupinya, sehingga memiliki ciri khas keislaman yang sangat kuat sampai disebut dengan konservatif. Tetapi, di sisi yang lain, Arab Saudi dihadapkan pada struktur dunia global yang memiliki tingkat modernisasi yang sangat maju, sehingga

⁵⁷Haidar Nashir, “Memahami Strukturasi Dalam Perspektif Sosiologi Giddens”, *Sosiologi Reflektif*, Vol. 7, No. 1 (Oktober 2012): 6.

⁵⁸Nirzalin, “Mendamaikan Aktor dan Struktur dalam Analisis Sosial Perspektif Teori Strukturasi Anthony Giddens”, 21.

⁵⁹ Haidar Nashir, “Memahami Strukturasi”, 7.

⁶⁰ B. Herry-Priyono, *Anthony Giddens; Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2002), 19.

pada posisi tersebut, Arab Saudi, dengan wewenang atau otoritas yang dimiliki, harus membuat kebijakan yang bisa menyesuaikan dengan dunia global. Kemudian adanya modernisasi dalam bentuk visi Saudi 2030 menjadikan Saudi mengalami berbagai macam perubahan baik ekonomi, sosial, maupun diskursus keagamaan.

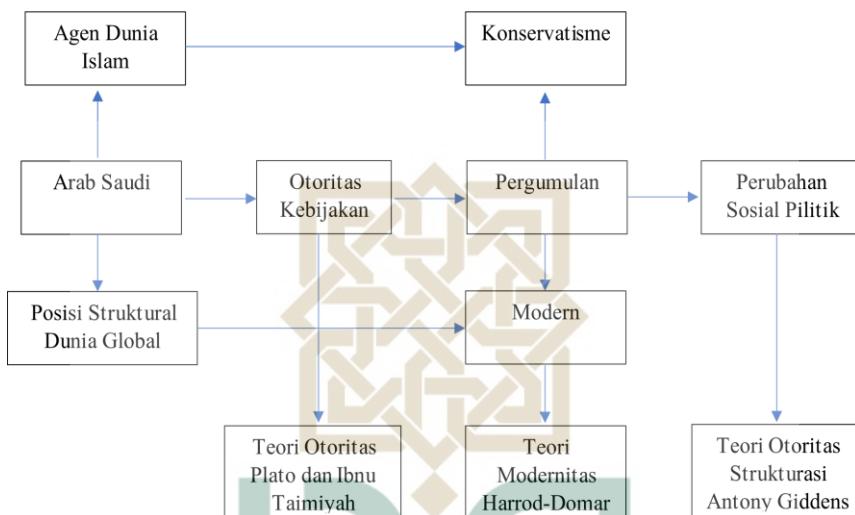


Diagram 1.3: Kerangka Teori dan Konsep

Teori yang penulis gunakan dalam mengkaji negara Arab Saudi ini secara berurutan bisa digambarkan dalam tabel di atas sekaligus masing-masing teori menjadi pisau bedah utama terhadap setiap rumusan masalah yang penulis pilih. Teori pertama yakni otoritas Plato dan Ibnu Taimiyah mengeksplorasi otoritas Negara Arab Saudi yang konservatif hingga memasuki perubahannya pada masa sekarang. Teori ini akan lebih tertuju pada rumusan masalah yang pertama. Adapun teori kedua yakni teori modernitas Harrod-Domar mencoba mengeksplorasi kecenderungan otoritas Arab Saudi yang membawa dan mengarahkan kepada modernitas, kemajuan teknologi dan penguatan ekonomi sebagai pintu perubahan terhadap negara tersebut yang kemudian memunculkan adanya pergumulan antara otoritas kekuasaan pilitik dan otoritas keagamaan. Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua dari kajian ini, sedangkan

teori yang terakhir yakni teori strukturalis Antony Giddens digunakan untuk mengeksplorasi perubahan sosial-politik dan budaya yang muncul di Arab Saudi di samping menjawab pertanyaan ketiga dari kajian ini.

Dengan demikian otoritas kekuasaan, modernisasi, dan perubahan sosial merupakan tiga praktik perubahan yang saling berkaitan dan terjadi di Arab Saudi beberapa tahun terakhir. Dengan adanya perubahan bentuk otoritas lama menuju otoritas yang baru, maka secara langsung atau tidak langsung juga berpengaruh kepada perubahan pola bermasyarakat pada setiap lapisannya, baik yang paling bawah yakni rakyat, bangsawan, saudagar, bahkan para ulamanya sekalipun juga terpengaruh, sehingga kebijakan dikeluarkan tidak berdasarkan sudut pandang keagamaan semata, namun juga bisa dipertimbangkan berdasarkan sudut pandang yang lain yang tidak kaku dan konservatif.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Kajian ini berbentuk penelitian kualitatif⁶¹ dan menitikberatkan pada kajian pustaka atau dokumen (*library research*),⁶² yakni kajian yang didasarkan pada temuan-temuan dan hasil penelitian terdahulu dan mendukung tindakan dalam mengatasi masalah penelitian,⁶³ mempertajam metodologi penelitian, mempertajam tinjauan teoritis yang digunakan, dan mendapatkan informasi mengenai penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti lainnya. Data-data yang dikumpulkan dan diteliti secara deskriptif-analisis-kritis. Kajian terkait data-data yang diperoleh menggunakan sumber-sumber dari

⁶¹ Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Lihat Robet K.Yin, *The Case Study Anthology*, (California: Sage, 2004), xix.

⁶² Dudung Abdur Rahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), 7.

⁶³ Surahman, Mochamad Rachmat, dan Sudibyo Supardi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan, 2016), 35.

berbagai peristiwa dan fenomena baik yang bersifat sejarah atau sosial yang memiliki korelasi dengan permasalahan dalam kajian ini.

Adapun pemilihan pustaka yang hendak dikaji berdasarkan tiga kriteria, yakni *pertama* relevansi antara sumber tujuan teori yang digunakan dengan variabel-variabel yang hendak diteliti. Artinya, jika keduanya semakin cocok maka kajian yang dilakukan juga menjadi baik. *Kedua*, kelengkapan data bacaan yang dicari dari berbagai sumber. Semakin banyak data kepustakaan yang didapatkan berarti semakin lengkap rujukan pada kajian yang dilakukan. *Ketiga*, kemutakhiran sumber data yang menjadi bahan acuan pada proses kajian. Artinya data kepustakaan yang dicari tertuju pada data-data terbaru dan memiliki kualifikasi yang memadai.⁶⁴ Dengan begitu, kajian ini diharapkan tidak hanya menjelaskan data-data yang didapatkan, namun juga mengupas dan membahas secara objektif dan kritis. Oleh karena itu, kesimpulan dan gagasan-gagasan yang didapatkan dihasilkan dari pembacaan dan proses penelitian yang cermat.⁶⁵

Adapun data kepustakaan dari kajian ini meliputi dari sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan objek penelitian. Sumber data kepustakaan tersebut diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian terdahulu baik yang berbentuk skripsi, tesis, maupun disertasi, dan sumber-sumber lain yang berasal dari media cetak maupun internet yang sesuai baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.⁶⁶

2. Pendekatan Penelitian

Dalam mengkaji fenomena yang terjadi di Arab Saudi, digunakan pendekatan Sosial Politik. Adapun konsep sosial politik di sini merupakan kajian yang berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, otoritas, dan komando di dalam semua lapisan

⁶⁴ Ibid. 35.

⁶⁵Perdy Karuru, “Pentingnya Kajian Pustaka Dalam Penelitian,” *JKIP Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 2, No. 1 (Desember 2017): 3.

⁶⁶Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), 73.

masyarakat. Menurut Leon Duguit, dalam setiap kelompok manusia dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari yang sementara maupun yang stabil, terdapat orang yang mendapat tugas untuk memerintah dan ada orang yang diperintah, ada yang membuat keputusan dan ada yang mematuhi keputusan tersebut.⁶⁷ Karena semua hal tersebut terdapat pada kehidupan sosial masyarakat dengan berbagai macam lapisannya. Dengan kata lain bahwa kehidupan masyarakat selalu memunculkan fenomena-fenomena baru yang bisa dikaji dengan pendekatan ini.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa sosial politik merupakan bidang subjek yang mempalajari mata rantai antara politik dan masyarakat, antara struktur-struktur sosial dan struktur-struktur politik, dan antara tingkah laku sosial dan tingkah laku politik. Adapun bidang kajiannya adalah menganalisis fenomena politik secara sosiologis. Dengan demikian, sosial politik dipandang sebagai kajian yang memuat aspek-aspek sosiologi dan aspek-aspek politik secara integratif.

3. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, yakni dengan menguraikan dan mendeskripsikan seluruh data, baik sumber primer maupun sekunder. ini lakukan untuk membangun argumentasi dan menghasilkan kesimpulan yang objektif, logis, konsisten, dan juga sistematis dari fenomena-fenomena yang dikaji.⁶⁸ Deskripsi yang dimaksud adalah uraian dalam bentuk kategori mengenai fenomena sosial tertentu sampai diperoleh ciri-ciri yang bervariasi. Dalam hal ini, perlu dilakukan formulasi dan interpretasi sosiologis terhadap fenomena yang terjadi hingga diperoleh pemahaman tertentu mengenai masalah yang menjadi fokus kajian pada disertasi ini.⁶⁹

⁶⁷*Ibid*, 6.

⁶⁸Sunyono Usman, *Sosiologi: Sejarah, Teori, dan Metodologi*, (Yogyakarta: CIRed, 2004), 99-100.

⁶⁹Sartono Kartodirjo, *Perspektif Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Gramedia, 1993), 126.

Deskriptif tersebut juga dimaksudkan untuk mengurai sumber-sumber peristiwa historis serta sosial secara teks dan konteks.⁷⁰ Dengan begitu informasi yang didapatkan bisa dikaji secara kritis dan selanjutnya dapat diketahui bahwa informasi yang didapatkan bersifat otentik atau tidak.

Upaya yang dilakukan dalam proses analisis ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Hebbemen. Reduksi data bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhir bisa diambil. Adapun penyajian data adalah suatu aktivitas ketika sekumpulan informasi telah disusun, sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan lebih lanjut. Sementara penarikan kesimpulan adalah memberikan hasil akhir dari pemikiran yang diambil dari data yang telah ada sebagai upaya verifikasi data yang kemudian disajikan dalam bentuk yang sudah diformulasikan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam disertasi ini penulis sajikan dalam enam bab. Masing-masing bagian merupakan bagian kelanjutan dari alur kajian-kajian yang telah dilakukan. Tujuh bagian tersebut mengikuti pola sistematika sebagai berikut:

Pada bab pertama, penelitian ini memuat pendahuluan. Bagian ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, peneliti menyajikan Arab Saudi dan Otoritas Kebijakan: Konservatisme Ideologi Wahabi dalam Kebijakan Arab Saudi. Fokus kajian pada sub bab ini adalah lahir dan perkembangan Arab Saudi sebagai sebuah negara, dan model, bentuk, sistem negara Arab Saudi, label Arab Saudi sebagai negara konservatif berideologi

⁷⁰Dudung Abdur Rahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2007), 53.

Wahhabi, sekilas tentang Wahhabisme dan pendirinya, serta kaidah berpikir ideologi Wahhabi.

Pada bab ketiga, peneliti menyajikan Modernisasi Arab Saudi; Pintu Perubahan. Termasuk pada bagian ini adalah munculnya paradigma modernisasi, pengaruh Muhammad bin Salman terhadap reformasi visi Saudi 2030, dan kebijakan luar negri Arab Saudi di bawah program reformasi.

Pada bab keempat berisi tentang pergumulan sosial politik keagamaan, konservatis dan modernis. Beberapa hal yang menjadi pembahasan antara lain, sosial keagamaan konservatif, sosial politik modernis, dan dilemma ambiguitas perubahan kebijakan di Arab Saudi.

Pada bab kelima diuraikan tentang perubahan sosiokultural masyarakat dalam pembangunan sosial politik di Arab Saudi, termasuk pada bagian ini adalah pengaruh kekuasaan kerajaan terhadap perubahan sosial budaya masyarakat dan pembangunan sosial politik Arab Saudi, konstruksi perubahan sosial di masyarakat Arab Saudi, pengaruh kebijakan politik Arab Saudi terhadap toleransi dan moderasi beragama, dan Islam moderat sebagai gerakan keagamaan baru.

Pada bab keenam penutup, yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan. Selain itu juga terdapat saran dan rekomendasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, perkembangan Arab Saudi sampai terbentuknya secara resmi sebagai sebuah negara yang berdaulat merupakan sebuah proses panjang yang dijalankan secara berkesinambungan dari generasi ke generasi, yakni sejak abad ke-18 sampai abad ke-21. Terbentuknya kolaborasi kekuatan antara kekuatan politik yang dimulai pada generasi Muhammad bin Saud beserta generasinya dan kekuatan agama yang diprakarsai oleh Muhammad bin Abdul Wahhab beserta generasinya, menjadikan Arab Saudi sebagai negara yang mendapatkan perhatian dari semua kalangan baik dari wilayah kawasan dunia Arab dan internasional.

Kolaborasi tersebut selanjutnya membentuk negara Arab Saudi yang memilih sistem pemerintahan yang bersifat monarki absolut, dimana kepemimpinan utama Arab Saudi dipimpin oleh seorang raja yang memimpin dan memiliki wewenang mutlak dalam menjalankan kepemimpinan Arab Saudi. Namun demikian pengaturan negara tersebut tidak bisa terlepas dari kekuatan agama yang selalu mengikat bagi negara, sehingga sistem kenegaraan tersebut berdampak pada seluruh aspek kehidupan sosial budaya masyarakat Arab Saudi dan menjadi negara yang berkarakter Islam yang sangat kental dengan paham yang didakwahkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab yang sering disebut dengan ideologi Wahhabi. Dengan karakter Islam yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahhab tersebut, Arab Saudi dikenal sebagai negara yang kaku, puritan, dan konservatif, dibandingkan dengan negara-negara lain yang juga memiliki populasi penduduknya mayoritas beragama Islam, baik di wilayah Timur Tengah, benua Eropa, bahkan Asia.

Konservatisme di Arab Saudi, yang telah lama menjadi ciri khas negara ini, mulai menunjukkan perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sejak naiknya Putra Mahkota Mohammad bin Salman (MBS) pada tahun 2017, serangkaian reformasi masif telah

diluncurkan melalui visi 2030. Reformasi ini mencakup pelonggaran aturan-aturan sosial yang ketat, seperti pencabutan larangan mengemudi bagi wanita, pembukaan bioskop, dan pembolehan konser musik serta acara olahraga campuran. Langkah-langkah ini mencerminkan upaya untuk mengurangi ketergantungan ekonomi pada minyak dan mengubah citra negara sebagai bagian dari modernisasi dan diversifikasi ekonomi.

Perubahan ini juga mencakup reformasi sektor hukum dan pemerintahan. Pengurangan kekuasaan dari polisi agama, atau Komite untuk Promosi Kebajikan dan Pencegahan Maksiat, telah mengurangi pengawasan ketat terhadap kehidupan pribadi masyarakat Arab Saudi. Selain itu, reformasi ekonomi yang dijalankan oleh MBS bertujuan menarik investasi asing dan meningkatkan partisipasi sektor swasta. Transformasi ini menunjukkan pergeseran dari konservatisme agama yang mendominasi kebijakan publik menuju pendekatan yang lebih pragmatis dan berorientasi pada pembangunan ekonomi.

Reformasi di Arab Saudi telah menarik perhatian internasional dan menunjukkan niat negara untuk beradaptasi dengan perubahan global. Melalui reformasi ini, Arab Saudi berusaha menyeimbangkan antara modernisasi ekonomi dan pelestarian nilai-nilai tradisionalnya, sebuah tantangan yang kompleks, tetapi penting bagi masa depan negara tersebut.

Kedua, modernisasi merupakan wujud perubahan global yang tidak bisa dihindari oleh negara manapun, termasuk negara Arab Saudi. Arab Saudi yang selama ini memiliki ketergantungan yang sangat kuat terhadap kekayaan sumber daya alamnya dituntut untuk bertransformasi akibat fluktuasi harga minyak yang tidak menentu. Hal tersebut menjadikan Arab Saudi berupaya untuk beradaptasi dengan mengatasi permasalahan perekonomian negara maupun perekonomian masyarakat melalui sumber-sumber pendapatan negara lainnya di sektor pariwisata dan industri kreatif.

Perubahan tersebut kemudian dikembangkan menjadi modernisasi Arab Saudi yang digagas oleh Muhammad bin Salman yang tertuang dalam program visi Saudi 2030. Visi tersebut sengaja digagas oleh MBS sebagai bentuk program reformasi yang nyata

sekaligus menjadi program ambisius kerajaan untuk bertransformasi dari perekonomian yang bergantung pada minyak bumi yang dinikmati masyarakat Arab Saudi selama ini. Visi Saudi 2030 menjadi upaya Arab Saudi untuk mewujudkan negara Arab Saudi yang modern dan inklusif.

Dari tiga pilar pokok yang terkandung dalam Visi Saudi 2030; *pertama*, pembangunan masyarakat maju, *kedua*, pembangunan ekonomi negara, dan *ketiga*, tujuan nasional negara Arab Saudi, Putra Mahkota Mohammad bin Salman (MBS) membawa pengaruh besar terhadap berbagai aspek kebangkitan di Arab Saudi, seperti kebangkitan nasionalisme, politik, ekonomi, dan kepercayaan politik masyarakat. Secara nasional, Visi 2030 berupaya membangkitkan rasa kebanggaan nasional di antara masyarakat Arab Saudi dengan menekankan identitas nasional dan warisan budaya, serta mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan negara. Program ini juga menggarisbawahi kontribusi generasi muda dalam membangun masa depan yang lebih maju dan berkelanjutan, yang secara signifikan meningkatkan semangat nasionalisme di kalangan masyarakat.

Dari segi perkembangan politik, Visi 2030 telah mengarahkan Arab Saudi menuju modernisasi sektor publik dan swasta. Pemerintah telah mengadopsi berbagai kebijakan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan mengintegrasikan teknologi dalam pelayanan publik. Hal ini tercermin dalam pengembangan proyek-proyek besar seperti Neom, sebuah kota futuristik yang mengandalkan teknologi canggih dan energi terbarukan. Perkembangan ini menunjukkan perubahan menuju pemerintahan yang lebih berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana keputusan diambil berdasarkan data dan analisis strategis yang mendalam serta keluar dari doktrin paham konservatisme keagamaan sebagaimana masa-masa sebelumnya.

Selain itu, perkembangan ekonomi juga menjadi fokus utama Visi 2030, dengan tujuan diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada minyak bumi. Melalui berbagai inisiatif, seperti pengembangan sektor pariwisata, hiburan, dan industri non-minyak lainnya, Arab Saudi berusaha menarik investasi asing dan menciptakan lapangan kerja baru. Reformasi ini telah mendorong

pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan peran sektor swasta dalam perekonomian negara. Sebagai hasilnya, Arab Saudi mulai menempatkan diri sebagai pusat bisnis dan investasi yang kompetitif di kawasan Timur Tengah.

Kebijakan di atas berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap politik Arab Saudi juga mengalami perubahan signifikan di bawah Visi 2030. Reformasi yang dilakukan oleh MBS, meskipun kontroversial, telah mendapatkan dukungan dari sebagian besar masyarakat yang menginginkan reformasi dan modernisasi. Kendatipun demikian, masih ada tantangan terkait kebebasan politik dan hak asasi manusia yang perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan dukungan masyarakat.

Ketiga, Arab Saudi, dengan program modernisasi yang telah dijalankan saat ini, telah mencoba berubah jati diri negara dari negara yang memiliki citra kaku dan konservatif menjadi negara yang dinamis, moderat dan modern. Raja Salman melalui putranya yakni Muhammad bin Salman, dengan otoritas yang dimilikinya, telah mencetuskan gagasan baru yang luar biasa yang mampu mendobrak budaya lama Arab Saudi menuju budaya baru yang lebih kekinian. Tentu modernisasi Arab Saudi ini menjadi jembatan dalam mengubah masyarakat Arab Saudi dalam berbagai sektor baik sektor pola gaya hidup, cara pandang, dan cara pengamalan agama yang selama ini telah mengakar sejak dulu atau sejak adanya koalisi antara kekuasaan politik dan kekuasaan agama.

Beberapa contoh nyata bahwa Arab Saudi telah melakukan perubahan secara drastis terlihat dari berbagai kebijakan yang telah diputuskan selama ini. Misalnya, kebijakan terkait perempuan yang sebelumnya sangat terbatas pada aktivitas di ruang privat karena adanya larangan-larangan agama yang ketat. Saat ini, perempuan sudah dibebaskan beraktivitas, seperti mengemudi kendaraan, berpartisipasi di ruang publik, mendapatkan hak kerja, mengikuti militer yang biasanya hanya diperuntukkan bagi laki-laki, ikut serta dalam pemilu, bahkan menonton konser dan acara olahraga di ruang publik. Hal ini menunjukkan bahwa otoritas telah mendobrak budaya konservatif yang telah lama dijalankan di Arab Saudi sebagai negara

Islam, sehingga penerapan syariat Islam pasca modernisasi menjadi sangat berbeda dibandingkan dengan yang dijalankan pada abad ke-20.

Selain itu, kebijakan lain yang berhubungan dengan pertumbuhan sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan budaya telah mengalami transformasi yang signifikan. Saat ini, semua sektor tersebut dapat dinikmati oleh berbagai kalangan, baik masyarakat Arab Saudi sendiri maupun wisatawan dari negara lain yang berkunjung ke Arab Saudi. Sebelumnya, wisatawan asing biasanya datang ke Arab Saudi hanya untuk keperluan haji dan umroh, tetapi kini semuanya sudah berubah. Dengan demikian, perekonomian Arab Saudi menjadi lebih dinamis dan tidak lagi hanya bergantung pada sektor minyak.

Untuk melancarkan program modernisasi yang digagas oleh Putra Mahkota Mohammad bin Salman, pemerintah juga melakukan perombakan kabinet pemerintahan. Langkah ini bertujuan untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi terkait kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, serta menanggulangi para koruptor yang menjabat di pemerintahan. Reformasi birokrasi ini dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan dan mempercepat pelaksanaan Visi 2030.

Perubahan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif dan progresif, yang diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi asing dan meningkatkan daya saing ekonomi Arab Saudi di tingkat global. Peningkatan partisipasi perempuan dan kebijakan yang lebih terbuka juga berkontribusi pada penciptaan masyarakat yang lebih egaliter dan modern. Langkah-langkah ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki citra internasional Arab Saudi, tetapi juga untuk memberikan manfaat nyata bagi public masyarakat Arab Saudi secara luas.

Dengan reformasi yang sedang berlangsung, Arab Saudi sedang menuju era baru yang lebih modern dan dinamis. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan politik di dalam negeri, tetapi juga memperkuat posisi Arab Saudi di kancah internasional. Dengan diversifikasi ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat,

Arab Saudi siap menghadapi tantangan modernitas dan global dengan optimisme yang tinggi.

B. Saran-saran

Menurut penulis, penelitian dan kajian terkait Arab Saudi yang berkaitan dengan modernisasi dan perubahan sosial perlu kajian yang lebih mendalam lagi dalam bentuk penelitian yang lebih spesifik dengan menggunakan teori dan sudut pandang yang lain. Bisa jadi tantangan yang dihadapi oleh Arab Saudi adalah bagaimana menemukan rumusan baru yang bisa diterima oleh masyarakat Arab Saudi yang berhubungan dengan konsep pengamalan Islam yang begitu longgarnya dibanding dengan masa-masa sebelumnya yang dipraktikkan dengan kaku dan konservatif.

Selain itu, berdasarkan kajian dan kesimpulan pada penelitian ini, dapat diketahui bahwa perubahan yang terjadi di Arab Saudi baru ada pada tahap permulaan yang gagasannya muncul dari pihak pemerintah atau kerajaan. Hal itu dilakukan dengan mengorbankan harmonisasi dua koalisi besar yakni antara kekuasaan politik dan kekuasaan agama, dimana kebijakan modernisasi yang dikeluarkan telah mengesampingkan kekuasaan agama yang selama ini menjadi pondasi kuat dalam berideologi. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian lain yang mengkaji hubungan dua kekuatan tersebut, apakah nantinya akan terdapat perubahan superioritas, atau pelunakan paham keislaman yang berbeda dengan yang ada saat ini sehingga dengan hanya adanya pelunakan tersebut hubungan keduanya tetap harmonis atau bahkan justru ideologi kenegaraan yang akan diubah di masa mendatang menolak ideologi Wahabi sebagai pondasi paham keagamaan negara Arab Saudi.]

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Syani. *Sosiologi, Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Askara, 1994.
- Abd ar-Rahman al-Juraisy, Khalid bin. *Fatawa Ulama al-Balad al-Haram*. Riyadh: tt, 2011.
- Abrari, Fawaid. *Perubahan Budaya Saudi Arabia Era Kepemimpinan Raja Salman dalam Perspektif Kajian Unsur-unsur Budayanya*. Tesis: Uivesitas Gajah Mada Yogyakarta, 2019.
- Adriansah, Andi. *Peran Politik Muhammad bin salman dalam Modernisasi Menuju Visi 2030 Saudi Arabia*. Skripsi: UIN syarif Hidayatullah, 2021.
- After, David E. *Pengantar Analisa Politik*, Ter. Setiawan Abadi. Jakarta: LP3ES, 1985.
- Ahmad bin Zaini Dahlani, *Ad-Duror As-Sanniyyah fi Ar-Roddi 'Ala al-Wahhabiyah*, Istambul: Ihlas Vakfi, nd.
- Ahmad Al-Usairy, *Sejarah Islam dari zaman Nabi Adam hingga abad ke-20*. Penerjemah H. Samson Rahman MA. Jakarta: Akbar Media, 2003.
- Ainurrofiq, Faiq. *Daurul Mar'ah Fi al-Qitho' al-'Aam; Bainā Fatawa al-'Ulama' As-Su'uudiyyin wa Ru'yah al-Mamlakah al-'Arabiyyah as-Su'uudiyyah* 2030. Disertasi: UIN Sunan Kalijaga, 2022.
- Al-Asymawi, Muhammad Said. *Mu'alim Islam*. Second Edition. Beirut: al-Intishar al-Arabi, 2004.
- Algar, Hamid, *Wahhabisme: Tinjauan Kritis*. Jakarta: Democracy Project, 2011.
- Emman Alhussein, Saudi First: How hyper-nationalism is transforming Saudi Arabia, 19 Juni 2019, diakses 17 Juli 2024, https://ecfr.eu/publication/saudi_first_how_hyper_nationalism_is_transforming_saudi_arabia/.

- Al Jazeera, 2018 June 24, *The Saudi Women divorced by their husbands via text message*, <https://www.aljazeera.com/news/2018/6/24/the-saudi-women-divorced-by-their-husbands-via-text-message>.
- Al-Rasheed, M., *MBS: Reform, Revolution, and Power in Saudi Arabia*, Hurst Publishers, 2018.
- Al-Rasheed, Madawi. *Tarikhul 'Arobiyah As-su'udiyyah Bainal Qodim wal Hadits*. Cet. Ke-2. ttp: t.p, t.t.
- Al-Rasheed, Madawi. *The History of Saudi Arabia*, Ed. Ke-2. New York: Cambridge University Press, 2010.
- Al-Rasheed, Madawi. *The Politics of Saudi Arabia: Between Fragmentation and Stability*, Cambridge University Press, 2018.
- Al-Yassu'I, Louis Ma'luf. *al-munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- Alfaruk, Moh Wildan, Dinamika Keagamaan, Sosial, Politik Saudi Arabia dan Visi 2030 Muhammad bin Salman; Analisis Teori Perubahan Sosial dan Modernisasi, Tesis: UIN Sunan Kalijaga, 2022.
- Ali, Mukti. *Alam Pikiran Islam Modern di Timur Tengah*. Jakarta: Djambatan, 1995.
- Ali, Tariq. *The Clash of Fundamentalism, Crusades, Jihads, and Modernity*, diterjemahkan oleh Hordi Ariev dengan judul *Benturan Antarfundamentalis, Jihad Melawan Imperialisme Amerika*. Jakarta: Paramadina, 2004.
- Aliya, Abu. *Tarikh al-dawla al-Saudiyya al-thaniya 1840–1891 A history of the second Saudi state 1840-1891*. Riyadh: t.p. 1969.
- Allen, Charles. *God's Terrorists the Wahhabi Cult and The Hidden Roots of Modern Jihad*. United States of America, 2006.

Aminuddin, Choirul, 5 Alasan Arab Saudi Cabut Larangan Bioskop. Jakarta: TEMPO.CO., 2018.

Ansary, Tamim, *Dari Puncak Bagdad (Sejarah Dunia Versi Islam)*. Penerjemah Yuliani Liputo. Jakarta: Zaman, 2009.

Anwar, Hasbi, Peran Ulama dalam Kebijakan Pemerintah Saudi; Studi Kasus Kontraterorisme dan Fenomena Arab Spring. Tesis: Universitas Gajah Mada, 2013.

Asvaldo, Analisis Absennya Modernisasi Politik Arab Saudi Melalui Visi Saudi 2030, Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, 2020.

Albassam BA, *Reformasi Politik di Arab Saudi: Kebutuhan atau Kemewahan?*, Taylor & Francis Group, 2011.

Al-Saud, M.F, *Domestic and Foreign Policy Changes in Saudi Arabia under King Salman and Crown Prince Muhammad bin Salman: Two Sides of the Same Coin*, Middle East Institute, Policy Paper no. 30, 2018.

Al-Saud, T.F, *Crown Prince Mohammed Bin Salman's Saudi Arabia: A Revolution under Siege*. Columbia Global Reports, 2019.

Al-Sudairi, “The Role of the Saudi Religious Establishment in the Era of Vision 2030”, *Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS)*, Vol. 9, No. 2, 1225-1242

ALSharif, F, Z, & Gaur, S, 2021, *Unnderstanding the Rise of NEOM: A Perspektive on Vision 230 and Saudi Arabia's Diversification Strategy*. Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia), Vol. 15, No. 1, 31-47

Al-Tamimi, N, “The Saudi Arabian Religious Elite (Ulama) and the State's Relations with the Muslim Brotherhood”. *Digest of Middle East Studies*, Vol. 27, No. 2. 2018.

Az-Zirkily, Khoiruddin. *Al-Wajiz fi Siroti al-Malik ‘Abdil ‘Azi*. Cet. Ke-5. Beirut: Darul ‘Ilm, 1988.

Azra, Azyumardi dkk. “*Islam Indonesia 2020.*” Yogyakarta: UII PRESS, 2020.

B. Herry-Priyono. *Anthony Giddens; Suatu Pengantar*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2002.

Bashraheel, Aseel, “Rise and fall of the Saudi religious police,” 22 September 2019. Diakses 15 Mei 2024.
<https://www.arabnews.com/node/1558176/saudi-arabia>.

Bassam, Ibnu. *Ulamā an Najd Khilāl Samāniyati Qurūn*. Juz 3. Riyadh: Dar Al ‘Ashimah, 1998.

Baz, Abdul Aziz bin dkk. *Fatwa-Fatwa Terkini*. Ter. Musthafa, dkk, Jilid. I. Jakarta: Darul Haq, 2003.

BBC News, 2018, Januari 12, *Saudi Arabia Allows Women to Attend Football Matches*,
<https://www.bbc.com/news/world-middle-east-42651548>.

Bendle, Mervyn F, “Pendanaan Rahasia Saudi untuk Kelompok Islam Radikal di Australia”. Pengamat Nasional. Dewan Kepentingan Nasional, Melbourne, 2007.

Berg, Kebuntuan Strategis Arab Saudi- apa selanjutnya?, 2017.

Berger, Johannes, “*was bedeutet die Modernisierungstheorie wirklich- und was wird ihr blod unterstellt?*”. Leviathan 1996.

Berita harian Metro TV tayang pada tanggal 20 Juli 2020 pukul 13.00 WIB.

Bisyur, Utsman bin ‘Abdullah bin. *‘Unwanul Majdi fi Tarikh Najd*, Jilid. Ke-1, Ed. Ke-4. Riyadh: Dar al-Mulk ‘Abdul ‘Aziz, 1982.

Bowen, Wayne H. *The History of Saudi Arabia*. United State Of America: Greenwood Press, 2008.

Budiman, Arief. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.

Bunzel, Cole. *THE KINGDOM AND THE CALIPHATE: Duel of the Islamic States*. Carnegie Endowment for International Peace, 2016. <http://www.jstor.com/stable/resrep12895>.

Brudah, Ibnu. *Quo Vadis Dunia Arab Kontemporer? Gerakan Protes, Politik Islam, Covid-19, dan Arah Perubahan*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2020.

BP (Tinjauan Statistik Energi Dunia). (2002). London: BP Amoco plc. diakses 18 Agustus 2023 pukul 20.40 WIB.

Brown, N.J, 2018, “The Myth of the Authoritarian Model: Saudi Arabia`s Political Future”, *Foreign Affairs*, 97(4), 74-84

Boroujerdi, Mehrzad and Kourosh Rahimkhani, *Introduction: The Politics of Islam and Modernity in Iran and the Arab Word*,” Digest of Middle East Studies 25, no.

Cavatorta, F, *The Politics of Reform in Saudi Arabia: The Quest for Political Change and Reform*, New York: Routledge, 2019.

CIEC DATA, Pendapatan Pariwisata Arab Saudi. ciecdata.com., 2020.

Clarke, Peter Bernard, *Religius Baru dalam Perspektif Global: Studi Perubahan Keagamaan di Dunia Modern*. New York: Routledge, 2006.

Copleston, Frederick. *Filsafat Plato*, Terj. Atolah Renanda Yafi. Yogyakarta: BASABASI, 2020.

Cozza, J. Bisakah Visi Reformasi 2030 Mengganggu Stabilitas Arab Saudi. IndraStra Global, 2016.

Comte, Auguste, *Filsafat Positif*. Amerika Serikat: C. Blanchard, 1858.

Dahlan, Ahmad bin Zaini. *Ad-Duror As-Sanniyyah fi Ar-Roddi 'Ala al-Wahhabiyah*. Istambul: Ihlas Vakfi, tt.

Delong-Bas, Natana J. *Wahhabi Islam: From Revival and Reform To Global Jihad*. New York: Oxford University Press. 2004.

Debora, Yantina “Wanita Saudi sekarang bisa mengemudi, tapi hak-hak lain akan menyusul nanti.” tиро.id.

Dipoyudo, Kirdi, *Pusaran Strategis Dunia Timur Tengah*. Jakarta: CSIS, 1981.

Didik J. Rachbini, *Teori Ekonomi Politik dan Pilihan Publik*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.

EIA (Administrasi Informasi Energi). (2004). Ringkasan Analisis Negara Arab Saudi. Washington, DC, AS. diakses 18 Agustus 2023 pukul 21.10 WIB

El-Fadh, Khaled Abou, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*. Penerjemah Helmi Mustofa. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006.

El-Fadl, Khaled Abou, *Pencurian Besar: Merebut Kembali Islam dari Para Ekstremis*. San Francisco: Harper Publisher, 2005.

El Fadl, Kholed M. Abou. *Sejarah Wahabi & Salafi*, Terj. Helmi Mustofa. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2015.

Engineer, Asghar Ali, *Islam and Liberation Theology*, terj. Agung Prihantoro, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Esposito, John L. *Islam dan Politik*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

-----, *Unholy War Terror in The Name of Islam*. New York: Oxford University Press, 2002.

-----, *Perang Tidak Suci*. Yogyakarta: LKiS, 2003.

-----, *Ensiklopedia Oxford Dunia Islam Modern*. Bandung: Mizan, 2001.

Fajriah, Lily Rusna, Arab Saudi Hentikan Kecanduan Minyak, Kata Sudirman Lihat Peluang, Jakarta: SINDONEWS.com, 2016.

Gausse FG Arab Saudi di Timur Tengah Baru. AS: Council on Foreign Relations, 2011.

Giddens, Anthony, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern; Suatu Analisis Terhadap Karya Tulis Marx, Durkheim, dan Max Weber*, terj. Soeheba Kramadibrata, Jakarta: UI Press, 1986.

Giddens, Anthony, *Teori Strukturasi; Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Manusia*, Terj. Maufur & Daryanto. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Grigsby, Women2Drive Movement Kesadaran Saudi Kontemporer terhadap Posisi Perempuan dalam Masyarakat. Kolase Concordia: Researchgate.net, 2015.

Habib M. Alshuwaikhat & Ishak Mohammed, Keberlanjutan Penting dalam Visi Pembangunan Nasional-Bukti dari Visi Arab Saudi untuk tahun 2013.

Hafil, Muhammad, "Perbedaan Pendapat Para Ahli tentang Batas Jazirah Arab," 29 Agustus 2021. Diakses 01 Mei 2024. <https://ihram.republika.co.id/berita/qyltrn430/perbedaan-pendapat-para-ahli-tentang-batas-jazirah-arab>.

Hardiman, F. Budi. *Tujuh Teori Sosial, Sketsa, Penilaian, Perbandingan*. Yogyakarta: Kanisius, 1994.

Haryanti, Rosiana, 6 Terobosan Arab Saudi untuk Bangkitkan Industri Pariwisata dan Hiburan. KOMPAS.com, 2019.

Hidriyah, Sita, *Reformasi Ekonomi Arab Saudi*. Jakarta: Pusat Kajian Badan Keahlian DPR RI Press, 2016.

Hikmah, Citra Nur, *Visi Saudi: Reformasi Ekonomi Arab Saudi*. Jakarta: Jakarta State University Press, 2019.

Hitti, Philip K. *The History of Arab*. Terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dede Slamet Riyadi, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005.

هيئة-الأمر-بالمعروف-والنهي-عن-المنكر- مجرد-ذكر- اسمها-
<https://alarab.co.uk/> في-السعودية-يكفي
14 April 2022, diakses 15 Mei 2024.

<https://ahlulhadist.wordpress.com/2007/09/26/syaikh-hamud-bin-abdullah-at-tuwaijir/>. Diakses 19 Mei 2024.

<https://bola.kompas.com/read/2019/11/12/06450018/perempuan-arab-saudi-diiizinkan-tonton-piala-super-spanyol-di-stadion?page=all>, diakses 15 Juli 2024.

[https://databoks.katadata.co.id.](https://databoks.katadata.co.id/) 13 Negara Tujuan Utama Tenaga Kerja Indonesia. diakses pada 13 Juli 2023.

<http://www-mainmain-id.cdn.ampproject.org/neom-kota-masa-depan-arab-saudi.di> akses 23 Agustus 2023.

[https://ihram.co.id.](https://ihram.co.id/) Arab Saudi Luncurkan Asuransi Bagi Tenaga Kerja Asing, diakses pada 10 Mei 2023.

<https://international.sindonews.com/read/1194715/43/ketika-mohammed-bin-salman-tabok-wahhabi-untuk-tampilkan-islam-arab-saudi-yang-moderat-1693987775>, diakses 16 Juli 2024.

<https://internasional.kompas.com/read/2024/06/24/165141070/apa-itu-proyek-neom-milik-arab-saudi>. Diakses 14 Juli 2024

[https://www.ceicdata.com.](https://www.ceicdata.com/) PDB Riil Arab Saudi, diakses pada 10 Mei 2023.

<https://www.dw.com/id/putra-mahkota-saudi-kami-akan-kembali-ke-islam-moderat/a-41100126>, diakses 16 Juli 2024

[https://kemlu.go.id.](https://kemlu.go.id/) Profil Kerajaan Arab Saudi diakses pada 10 Mei 2023.

<https://www.britannica.com/biography/Mohammed-bin-Salman>, diakses 15 Juli 2024.

<https://nasional.sindonews.com/berita/1184424/19/sepak-terjang-raja-raja-arab-saudi-dari-masa-ke-masa>. Diakses 15 Juli 2024.

<https://vision2030.gov.sa>. Program Realisasi Visi, diakses pada 10 Mei 2023.

<https://dunia.Tempo.com/read/1047202/6-bahan-terbesar-terjadi-di-saudi-arab-pada-2018>. di akses 17 Mei 2023.

Https://P2k.Stekom.Ac.Id/Ensiklopedia/Sistem_Pemerintahan_Dasar_Arab_Saudi. Diakses 25 Januari 2023.

https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Abdul_Aziz_bin_Abdullah_bin_Baz, diakses pada 16 Mei 2024.

<https://www.state.gov/u-s-relations-with-saudi-arabia/>, diakses 16 Juli 2024

<https://www.tribunnews.com/internasional/2018/05/09/wanita-boleh-setir-mobil-di-arab-saudi-tapi-harus-siap-ditilang-rp-18-juta-bila-lakukan-3-hal-ini>, diakses 15 Juli 2024.

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20151213162058-120-97888/perempuan-saudi-memilih-untuk-pertama-kali>. Diakses 02 Desember 2022.

https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/12/151213_dunia_saudi_perwakilanperempuan, diakses 16 Juli 2024.

<https://www.saudiembassy.net/basic-law-governance>. Diakses 18 Januari 2023.

Ibn Bisyr, Ustman. *'Unwan al-Majd fi Tarikh Najd*. Makkah: 1349.

Ica, Cahayani, Sukseskan Visi Arab Saudi 2030 di Sektor Staycation. [kumparan.com.](http://kumparan.com/), 2021.

Idahram, Syaikh. *Ulama Sejagad Menggugat Wahabi*. Bantul: Pustaka Pesantren, 2012.

Iskandar, Mizaj. *SUNNI-WAHHABI; Mencari Titik Temu dan Seteru*. Banda Aceh: Percetakan Universitas Negeri (UIN) Ar-Raniry, 2018.

Institut Internasional untuk Studi Strategis, 2015.

Iqbal, Muhammad dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010.

James, Toth, Saudi Arabia's national Transformation Plan: Ambitions and Challenges, *Middle East Policy* 24, no. 4, 52-62

Jatmika, Sidik, *Hubungan Internasional Kawasan Timur Tengah*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2016.

John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Reformasi*. Terjemahan Macnun Husein. Jakarta: Rajawali Pers, 1993.

Johnson, Doyle Paul, *Teori sosiologi Klasik dan Modern*, Jakarta: Gramedia, 1994.

Karim, Nashir bin Abdul, *Hanya Islam, Bukan Wahhabisme*. Jakarta: Darul Falah, 2006.

Kartini, Indriana, *Politik Islam di Arab Saudi, Kuwait dan Uni Emirat Arab*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2020.

Karuru, Perdy, "Pentingnya Kajian Pustaka Dalam Penelitian," *JKIP Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 2, No. 1 (Desember 2017), 3.

Kartodirjo, Sartono, *Perspektif Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia, 1993.

Kementrian Agama RI, *Tanya Jawab Moderasi Beragama*, Jakarta Pusat: Badan Litbang dan Diklat Kementerian agama RI, 2019.

Kharisman, Abu Utsman, "Sekilas Biografi Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'diy," al-I'tisham 17 Mei 2021. Diakses 18 Mei 2024. <https://itishom.org/blog/artikel/tarikh/biografi/biografi-ringkas-syaikh-assadi>.

- Kinninmont J., Visi 2030 dan Penghematan dan Transformasi Kontrak Sosial Arab Saudi. Program Timur Tengah dan Afrika Utara, 2017.
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013.
- Lacroix, Stéphane. *Awakening Islam: The Politics of Religious Dissent in Contemporary Saudi Arabia*. England: Harvard University Press, 2011.
- Lacroix, S, “Political Changes in Saudi Arabia: The Centralization of Power and the Marginalization of the Ulama”. *Digest of Middle East Studies* 28 (2) 2019.
- Lenczowski, Geroge. *Timur Tengah di Kancah Dunia*, Terj. Asgar Bixby. Bandung: 1993.
- Lewis, *Krisis Islam: Antara Perang Suci dan Teror Islam*. Surabaya: Jawa Pos Press, 2004.
- Lorimer, J. G. *Gazetteer of the Persian Gulf, Oman and Central Arabia*. Calcutta: Government Print House, 1908, 1097.
- M. Agastya, *Arab Spring Badai Timur Tengah yang Penuh Darah*, Jogjakarta: IRCiSod, 2013.
- Madawi, A. *The Limmits of Change: The crown Prince and the Strucutre of Power in Saudi Arabia*. Oxford University Press, 2020.
- Mada, Kris, Hubungan Makin Rapat, Arab-China Sepakati Investasi Rp 149 Triliun, 12 Juni 2023, diakses 16 Juli 2024. <https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/06/12/arab-saudi-china-kembali-sepakati-investasi-miliaran-dollar-as>.
- Maria Rita Hasugian, 6 Perubahan Terbesar yang Terjadi di Arab Saudi Tahun 2018. Jakarta: Tempo.CO. 2018. di akses 17-05-2023.

Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006.

Maulida, Siti Indriani, Pengaruh Modernisasi Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Badui di Arab Saudi. Program Studi Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017.

Mufrodi, Ali. *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*. Jakarta: Logos, 1997.

Muhammad Al-Bahiy, *Pemikiran Islam*. Penerjemah Bambang Saiful Ma'arif,. Bandung: Bandung Risale, 1985.

Muhammad, Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah al-Jibrin abu. *Ibhâju al-Mukminâن bi Sharhi Manhaj al-sâlikîn*. Cet. 5, Jilid. I. Riyadh, Madâru al-Waton, 2013.

Muhandis, Ahmad, "Biografi Singkat asy-Syaikh Shalih al-Fauzan hafizhahullahu Ta'ala," 1 Dzulhijjah 1442H, diakses 19 Mei 2024, <https://www.minhajulatsar.com/biografi-singkat-asy-syaikh-shalih-al-fauzan-hafizhahullahu-taala/>.

Mujihastuti, Nimas Ayu. Analisis Perubahan Terhadap Kebijakan Arab Saudi Terkait Peran Perempuan di Ruang Publik: Studi Kasus Keputusan Kerajaan No. M/85 Tahun 2017. Universitas Airlangga, 2019.

Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: Mizan, 2005.

Najib, Thoriq Muhammad. *Al-Wahabiyyun Takfiriyyun symuliyyun*. Libanon: Syirkah Dar al-Masyari', 2022.

Narwoko, Dwi J, Bagong Suyanto. *Sosiologi Teks Pengantar & Terapan*, Jakarta: Kencana, 2007.

Nashir, Haidar, "Memahami Strukturasi Dalam Perspektif Sosiologi Giddens," *Sosiologi Reflektif*, Vol. 7, No 1 (Oktober 2012): 6.

Nashir bin Abdul Karim, *Hanya Islam Bukan Wahabi*. Jakarta: Darul Falah, 2006.

Nasution, Harun, *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam Tinjauan Antardisiplin Ilmu*, Bandung: Purjalit dan Nuansa, 1998.

-----, *Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Cet. VII, PT Bulan Bintang: Jakarta, 1990.

Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, cet. Ke-IX, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Nathasa Hamilton Hart, "Pemerintah dan Bisnis Swasta: Sewa, Representasi dan Aksi Kolektif." Di Indonesia: Demokrasi dan Janji Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, eds. Andrew MacIntyre dan Ross McLeod H. (ISEAS, 2007).

Newswire, Perekonomian Arab Saudi Melonjak Berkat 'Staycation'. Jakarta: Bisnis.com. 2021.

Nimas Ayu Mujihastuti, "Analisis Perempuan Terhadap Kebijakan Arab Saudi Terkait Peran Perempuan di Ruang Publik". Universitas Airlangga, 2017.

Otoritas Umum untuk Statika, Laporan Eksport dan Impor Komoditas Non-minyak Arab Saudi 2016, (Arab Saudi: The General Department of Economic Statistics Press, 2016).

Philbi, S.T. Jhon, *Bi'tsanu Ila Najd 1336-1337 H/ 1917-1918 M*, Ter. Abdullah Sholih al-'Usaimin. Riyad: Maktabah al-'Abik, 1996.

Prastiwi, "Untuk pertama kalinya, Arab Saudi mengizinkan perempuan masuk stadion," merdeka6.com.

Prasojo, Eko, *Reformasi Kedua: Melanjutkan Reformasi Edtafet*. Jakarta: Salemba Humanika, 2009.

Purnama, Yulian, "Biografi Syaikh DR. Shalih bin Fauzan Al Fauzan," 12 Agustus 2023. Diakses 19 Mei 2024. <https://muslim.or.id/9338-biografi-syaikh-dr-shalih-bin-fauzan-al-fauzan.html>.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Putri, Risa Maharani. “Negara Yang Menggunakan Syari’at Islam sebagai Hukum Negara,” SINDONEWS.COM, 18 November 2022. Diakses 10 Maret 2023. <https://international.sindonews.com/read/945103/45/negara-yang-menggunakan-syariat-islam-sebagai-hukum-negara-1668762662?showpage=all>.

Putri, Risa Maharani, “Negara yang Menggunakan Syariat Islam sebagai Hukum Negara,” SINDONEWS.COM, 18 November 2022.

Pujayanti, A. Kematian Jamal Khashoggi dan Implikasinya Terhadap Hubungan Luar Negeri Arab Saudi. *Info Singkat*, 2018.

Rahman, Dudung Abdur, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Rahman, Dudung Abdur, *Metode Penelitian Sejarah*, Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2007.

Rahman, Musthafa Abd. *Revolusi social-Budaya Goncang Arab Saudi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2022.

Rahman, Sainul, Saudi Arabia Baru; Visi 2030, Reformasi, dan Wahabisme, Tesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Rahmania, Neysa, “Analisis Gaya Kepemimpinan Muhammad bin Salman”. Tesis. Jawa Timur: Universitas Airlangga, 2019.

Ramadhan, Muhammad Ari, Kebijakan Luar Negeri Saudi Arabia Pasca Diluncurkannya Program Saudi Vision 2030, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021.

Rasheed, Madawi, *Melawan Negara Saudi: Suara Islam dari Generasi Baru*, New York: Cambridge University Press, 2007.

Reason, James, *Human Error*. New York: Cambridge University Press, 1990.

Reditya, Tito Hilmawan.
<https://www.kompas.com/global/read/2021/07/22/083508070/profil-pemimpin-dunia-raja-salman-bin-abdulaziz-al-saud?page=all>. Diakses 08 Desember 2022.

Ridwan, Nur Kholik. *Kajian Kritis dan Komprehensif Sejarah Lengkap Wahabi, Perjalanan Panjang Sejarah, Doktrin, Amaliah, dan Pergulatannya*. Yogyakarta: IRCiSod, 2020.

Ritze, George dan Douglas J. Googman, *Teori Sosiologi; Dari Teori Sosiologi Klasik Hingga Perkembangan Murakhir*, Terj, Nurhadi, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008.

Riza Sihbudi, dkk., *Profil Negara Timur Tengah*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1955.

Robbins, Stephen P, *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, dan Aplikasi* terjemahan Hadyana Pujaatmaka, Jakarta: Prenhallindo, 1996.

Rojak, Jeje Abdul, *Politik Kenegaraan Pemikiran-Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah*, Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1999.

Royce, Edward, *Clasical Social Theory and Modern Society; Marx, Durkheim, Weber*, New York: Rowman & Littlefield, 2015.

Rozi, Fatkhur, "Kebijakan Ruang Publik Perempuan: Agenda Politik Double Interest Saudi," *International Journal Ihya' 'Ulumu Al-Din*, Vol. 19, No 2 (2017), 274.

Rosida, Anis, *Wacana Tantangan Peradaban, Peran Perempuan Sebagai Tonggak Sejarah Arab Saudi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel: Surabaya, 2018.

Sahid, Komarudin, *Memahami Sosiologi Politik*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Salim, Abdul Muin, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

- Salim, Peter dan Venny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Santi, Selvia, Studi Karakteristik Perkembangan Sains di Iran, Saudi Arabia, dan Mesir (1950-2000), *Proseding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains*, Vol. 1, (September 2018): 181-182.
- Sarah, Siti dkk, "Modernisasi Arab Saudi Era Muhammad bin Salman," *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol. 25 No. 2 (Oktober 2023): 156.
- Satria, Dendy Perwira Dhira, Perempuan di Arab Saudi dalam Kehidupan Sosial Pasca Kebijakan Baru Pemerintahan Raja Salman bin Abdul Azis. UI Paper, Universitas Indonesia, 2019.
- Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.
- Seymour, *Kematian Rentierisme di Kerajaan Arab Saudi*. The University of Utah, 2012.
- Shariati, Ali, *Tugas Ulama Muslim. Penerjemah M. Amin Rais*. Jakarta: CV Rajawali, 1984.
- Shireen T. Hunter, *Politik Kebangkitan Islam: Keberagaman dan Persatuan*. Penerjemah Ajat Sudrajat. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogyakarta, 2001.
- Siahaan, Hotman M. *Pengantar ke Arah Sejarah dan Teori Sosiologi*. Jakarta: Erlangga, 1986.
- Sianturi, Nevilta, Pengaruh Visi Saudi 2030 dan Agenda Foreign Direct Investment (FDI) Arab Saudi di Indonesia, Student Online Journal, 2017.
- Sihbudi, Riza. *Islam: Dunia Arab, Iran, Bara Timur Tengah*. Bandung: Mizan, 1991.
- Singh, Pavitar Parkash. *Economics of Growth and Development*. New Delhi: USI PUBLICATIONS, tt.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Sorongan, Tommy Patrio. AS Jangan Iri, Raja Salman Gelar Karpet Merah untuk China, 12 June 2023, diakses 16 Juli 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230612195605-4-445274/as-jangan-iri-raja-salman-gelar-karpet-merah-untuk-china>.

Stéphane Lacroix, *Awakening Islam: The Politics of Religious Dissent in Contemporary Saudi Arabia*. Inggris: Harvard University Press, 2011.

Surahman, Mochamad Rachmat, dan Sudibyo Supardi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan, 2016.

Syabriya, Nadilla, "Apa yang Disebut dengan Negara Barat, Ini Daftar Negaranya," 22 September 2022. Diakses 29 April 2024. <https://news.okezone.com/read/2022/09/28/18/2676767/apa-yang-disebut-dengan-dunia-barat-ini-daftar-negaranya>.

Syamsi, Ibnu, *Pengambilan Keputusan dan Sistem Informasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

Sztompka, Piotr, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Taimiyah, Ibnu, *Majmu' ar-Rasail al-Kubra*, Kairo: Maktabah al-Misriyah, 1322 H, Vol. I.

Taimiyah, Ibnu, *Siyasah Syar'iyah Etika Politik Islam*, Ter. Rofiq Munawwar, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

The Guardian, 2018, April 4, *Saudi Arabia's Bin salman 'has the Support of Most Young Saudis*. Retrieved from. <https://www.theguardian.com/world/2018/apr/4/saudi-arabia-crown-prince-mohammed-bin-salman-most-young-saudis-support-him>.

The Guardian, 2018 April 24, *Saudi Arabia to Open Up to Foreign Tourists Under Relaxed New Visa Rules*, <https://www.theguardian.com/world/2018/apr/24/saudi-arabia-to-open-up-to-foreign-tourists-under-relaxed-new-visa-rules>.

The New York Times, 2018 April 18, *Saudi Arabia's First Movie Theater in Decades Opens with Black Panther*, <https://www.nytimes.com/2018/04/18/world/middleeast/saudi-arabia-cinema-black-panther.html>.

The Ulama of Dar Al-Ahnaf. *Saudi Arabia Wahhabism and The Salafi Sect; Understanding the Great Conspiracy*. South Africa: Dar al-Ahnaf, tt.

Thoriq Muhammad Najib, *Al-Wahabiyun Takfiriyyun Syumuliyyun*. Lebanon: Syirkah Dar al-Masyari', 2022.

Thompson, MC, Visi Saudi 2030: Respon yang Tepat terhadap Aspirasi dan Kekhawatiran Pemuda. Urusan Asia, (2017).

Thohir, *Kajian Regional Dunia Islam (Perspektif Etno-Linguistik dan Geo-Politik)*.

Tria, <https://www.infobiografi.com/biografi-lengkap-salman-bin-abdulaziz-al-saud/>, diakses 29 Desember 2022.

Usman, Sunyono. *Sosiologi: Sejarah, Teori, dan Metodologi*. Yogyakarta: CIRed, 2004.

Ulama Dar Al-Ahnaf, Wahhabisme Arab Saudi dan sekte Salafi; Memahami Konspirasi Besar, (Afrika Selatan: Dar al-Ahnaf).

Vassiliev, Alexei. *Tarikhul 'Arobiyyah as-Su'udiyyah*. Bairut: Darunnasyr, 1995.

-----, *The History of Saudi Arabia*. ttp.: t.p., t.t.

Veeger, *Realitas Sosial*, Jakarta: Gramedia, 1993.

W.J.S Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. cet. Ke-XII. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Wafi, Mahmud Hibatul, Wacana Reformasi Arab Saudi: Kontestasi Kerajaan Saudi dan Wahhabisme, 2018.

Wahab Majjid dan Kamil al-Muhandis. *Mu'jam al-Musthalahat al-'Arabiyyah fi al-Lughah wa al-adab*. Beirut: Maktabah Lubanani, 1984.

Wald, Ellen R. *Saudi INC. The Arabian Kingdom's Pursuit of The Profit and Power*. New York: Pegasus Books, t.t.

Wirawan, *Kepemimpinan; Teori, Psikologi, Prilaku Organisasi, Aplikasi dan Penelitian*, Jakarta: Grafindo Persada, 2013.

Wucherpfennig, J. dan Deutsch, F. Modernisasi dan Demokrasi: Teori dan Bukti Ditinjau Kembali. Tinjauan Kehidupan dalam Demokrasi, 2009.

Wynbrandt, James. *A Brief History of Saudi Arabia*, Ed. Ke-2. United States of America: Maple-Vail Book Manufacturing Group, 2010

www.kompas.com. Sejarah, Tujuan dan Peran G-20.

www.eia.gov. Dari Mana Minyak Kami Berasal.

Yasinta, Veronika, Saudi Latih Perempuan Bekerja di Sektor Pariwisata. Kompas.com.

Yatim, Badri. *Historiografi Islam*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997.

Yin, Robet K. *The Case Study Anthology*. California: Sage, 2004.

Yohanes. L. Esposito. *Ensiklopedia Oxford Dunia Islam Modern*, (Bandung: Mizan, 2001).

Zainal Abidin bin Syamsuddin. *Membedah akar Fitnah Wahhabi Buku Putih Dakwah Salafiyah*. Jakarta: Pustaka Imam Bonjol, 2015.

Zamzami, Fitriyan, Mengapa Saudi Berani Tantang Eropa dan Bela Rusia? Rabu 10 Jul 2024, diakses 16 Juli 2024. <https://news.republika.co.id/berita/sgemj2393/mengapa-saudi-berani-tantang-eropa-dan-bela-rusia-part1>.

”تقرير-أين-ذهب-هيئه-الأمر-بالمعروف-في-السعودية“ 14 Januari 2022, diakses 14 Mei 2024, https://arabic-rt.com.translate.goog/middle_east/1314229

Jurnal

Abdullah. “Dinamika Islam di Arab Saudi,” *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari (JIAJ)* Vol. 4 No 1 (Juni 2019): 161.

Adibah, Ida Zahara. “Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam,” *Jurnal Inspirasi* Vol. 1, No. 1 (Januari-Juni 2017): 3.

Ahmad, Fadlan. “Pemilihan Umum Dewan Kota Arab Saudi 2005,” *Nady Al-Adab*, Vol. 15 Issue 2 (November 2018): 11.

Ahmad, Zainal Abidin. “Anatomi Teori Strukturasi dan Ideologi Jalan Ketiga Anthony Giddens,” *Jurnal Translitera*, Vol. 9, No. 2 (2020): 57.

Akbar, Idil. “Khilafah Islamiyah: Antara Konsep dan Realitas Kenegaraan (Republik Islam Iran dan Kerajaan Islam Arab Saudi),” *Journal of Government and Civil Society* Vol. 1, No. 1 (April 2017): 105.

Akif, Mehmet. “Interpretation of the Rise of MBS and Saudi Foreign Policy According to the Barakah Circle Theory,” *Journal of Islamicjerusalem Studies* Vol. 19, No. 2 (2019): 167.

Al-Hebaishi, F. “Vision 2030 and Social Transformation in Saudi Arabia,” *Middle East policy* 25, 2 (2018): 102-114.

AI-Fahadt, Abdulaziz H. "Ornamental Constitutionalism: The Saudi Basic Law of Governance," *The Yale Journal of International Law*, Vol. 30:347 (2005): 376.

Alkhathlan, K, "The Vision 2030 of Saudi Arabia," a review. *Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences* 19, 1 (2020): 1-7.

Ali, Muhammad dan Muhammad Syaroni Rofii. "Arah Kebijakan Militer Arab Saudi di bawah Komando Muhammad bin Salman (MBS) Menghadapi Visi Saudi 2030," *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, Vol. 8, No. 2 (Juli-Desember 2021): 5-6.

Anwar, Ahmad, "Rasionalitas Riyadh dalam Dinamika Hubungan Saudi dan Amerika," *Jurnal PIR* Vol.1 No. 1 (Agustus 2016): 4.

Anwar, Hasbi, "Politik Luar Negeri Saudi Arabia dan Ajaran Salafi-Wahabi di Indonesia," *JSIERA: The Journal of Islamic Studies and International Relations* Volume 1, (Agustus 2016): 19.

Analieza Ilmiatun Mufiedah, Setyasih Harini, & Halifa Haqqi. "Reformasi Hak Perempuan Arab Saudi Melalui Visi Saudi 2030 2017-2019," *SolidaritasJurnal Ilmu Sosial*, Vol 4, No. 3 (2021).

Andreas Doweng Bolo. "Pemikiran Filsafat Indonesia: Kajian Hermeneutika," *Jurnal Melintas*, (2019).

Barmada, K.A., & Harthi, F.A. "Vision 2030 for Saudi Arabia: Opportunities and Challenges," *Journal of King Saud University-Engineering Sciences* 31, 3 (2019): 249-256.

BA Albassam. "Reformasi Politik di Arab Saudi: Kebutuhan atau Kemewahan?," *Jurnal Online Studi Timur Tengah*, Vol. 3, No. 6, (2011).

Chairi, Effendi. "Ketidadaan Otoritas Terpusat dalam Fenomena Kontemporer di Indonesia; Kritik Terhadap Teori Otoritas Max Weber," *Sangkep Jurnal Kajian sosial Keagamaan*, Volume 2, Nomer 2 (Juli-Desember 2019): 201.

- Chabibi, Muhammad. "Hukum Tiga Tahap Auguste Comte dan Kontribusinya dalam Kajian Sosial Dakwah," *Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, (2019).
- Davidson, C. "The Saudi Paradox: The role of the ulema in the age of MBS, Brookings Institution Press Kamrava, M, 2018, Saudi Arabia's Modernization: Between Continuity and Change," *Journal of Arabian Studies*, 9, 2 (2019) 139-15.
- Dewi, Nevy Rusmarina, Azza Ihsanul Fikri, & Afifah Febriani. "Dinamika Kesetaraan Gender di Arab Saudi: Harapan Baru di Era Raja Salman," *Jurnal Sosial Politik*, (2020).
- Drajad, Anna Zakiah dan Toni Kurniawan. "Saudi Vision 2030 dan Kebijakan Reformasi pada Kerajaan Saudi Arabia", *Global and Policy Journal of International Relations* Vol. 9, No.1 (Januari-Juni 2021): 43.
- Fadila, Nur, "Dampak Negatif Wahabi pada Masyarakat," *NIHAIYYAT: Journal of Islamic Interdisciplinary Studies* Volume 2, No. 1 (April 2023): 49.
- Farah, Naila. "Pola Pemikiran Kelompok Tradisionalis dan Modernis dalam Islam," *YAQZAN* Volume 2, Nomor 1 (Juni 2016): 5.
- Fauzan, Pepen Irpan dan Ahmad Khoirul Fata. "Model Penerapan Syari'ah Dalam Negara Modern: Studi Kasus Arab Saudi, Iran, Turki dan Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. XII No. 1 (Juni 2018): 58
- Falahi, Ziyad. "Prospek Regionalisme Timur Tengah Pasca Arab Spring: An Examination of the Collective Identity of the Arab League," *Journal of Regional Studies* (2012).
- Haif, Abu. "Perkembangan Islam di Arab Saudi: Setudi Sejarah Islam Modern," *Jurnal Rihlah* Vol. III, No. 1 (Oktorber 2015): 18.
- Hajar, Imam Ibnu. "Reinterpretasi Hukum Larangan Bepergian Tanpa Mahram Bagi Perempuan", *Al Manahij*, Vol. 6, No. 1 (2012).

Hamdani, Ali Yazid. "Debut Politik Muhammad Ibnu Abdul Wahhab & Muhammad Ibnu Saud," *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah*, Vol. 1 No.2 (Desember 2019): 177.

Hammadi, Ali Abdel. "The Internal Rivalry Between the House of Saud and Its Impact on Overthrowing the State Second Saudi Arabia 1865-1891," *Journal of College of Education* 2518-5586 (Februari 2022): 3

Handoyo, Setiyo Yuli "Transformasi Sosial Desa Adat menjadi Desa Wisata Edelweis: Perspektif Teori Strukturisasi Anthony Giddens", *Agribusiness Journal*, Vol. 13, No. 2 (2019): 54.

Haryadi, Panji. "Peran Muhammad bin Salman terhadap Perubahan Pilar Kenegaraan Saudi Arabia," *Jurnal ICMES* Volume 2. No. 1 (Juni 2018): 26.

Haryanto, Sri. "Pendekatan Historis dalam Studi Islam," *Manarul Qur'an; Jurnal Ilmiah Studi Islam*, Vol. 17, No. 1 (Desember 2017): 131.

Hidayat, Riyand dan Yon Machmudi. "Perubahan Sosial Politik Di Arab Saudi 1932-1975," *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, Vol. 4, No. 1 (Januari – Juni 2017): 15.



Hidayat Nadiya Azahra, Yon Mahmudi, dan Siti Rohmah Soekarba, “VISION 2030: SAUDI ARABIA’S MODERNIZATION”, *CMES: Jurnal Studi Timur Tengah*, Vol. XV, No. 2 (July—December 2022): 144.

Hikmah, Citra Nur, dan Abrar. “Saudi Vision, Reformasi Saudi Arabia,” *PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah* Vol. 1 No.1 (Maret 2019): 1.

Ichwansyah Tampubolon. “Orientasi dan Corak Reformasi Islam: Kajian Respon Masyarakat Islam,” *MADANIA*, Vol. XVIII, No.1 (Juni 2014).

Ishak, Ajub. “Ciri-ciri Pendekatan Sosiologi dan Sejarah dalam Mengkaji Hukum Islam,” *Al-Mizan Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol. 9, No. 1 (Juni 2013): 66.

Izaqi, M. Syafrizal. “Pengaruh Kelompok Wahhabi Terhadap Kebijakan Luar Negeri Arab Saudi Pada Masa Arab Spring di Mesir 2011-2013,” *Jurnal Analisis Hubungan Internasional* Vol. 5 No. 2, (Juni 2006).

Kahar, Indo Santalia, dan Wahyuddin. “Sejarah Revivalisme Islam di Saudi Arabia: Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab,” *Retorika Jurnal Kajian Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Volume. 4, No. 2 (2022): 129.

Kamila, Maulida Zahra. “Hukum Keluarga Di Saudi Arabia,” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* Vol. 2, No. 2 (September 2021): 137.

Kechichian, Joseph A. “The Role of The Ulama in The Politics of an Islamic State; The Case of Saudi Arabia,” *International Journal of Middle East Studies* Vol. 18, No. 01 (Feb. 1986): 53. <http://www.jstor.com/stable/162860>.

M. Arif Khoiruddin. “Pendekatan Sosiologi dalam Studi Islam,” *Tribakti Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol. 25, No. 2, (September 2014): 401.

M. Zulifan. "Reposisi Identitas Sosial Perempuan Saudi Pasca Terbitnya Visi Saudi 2030," *Nady Al-Adab: Jurnal Bahasa Arab* Volume 19, Issue 2 (November 2022) 65.

Maryani, Ani. "Fenomena K-Pop di Saudi Arabia, Pengaruh Reformasi Sosial terhadap Otoritas Keagamaan," *Jurnal ICMES*, Vol. 5, No. 1 (Juni 2021): 126.

Mas'odi. "Wahabisme vis-à-vis Reformasi Saudi Arabia: MBS, Agensi, Moderasi, dan Diverifikasi Ekonomi," *Jurnal Al-Irfan*, Vol 3, No.1, (Maret 2020): 53-54.

Mega Hardiyanti & Sri Yuniati, Jaminan Hak-Hak Perempuan dalam Visi Arab Saudi 2030 (Jaminan Hak-Hak Perempuan dalam Visi Arab Saudi 2030), *Jurnal Kajian Feminisme dan Gender* (2021).

Misliharira Shaumi Putri, Reni Windiani, & Satwika Paramasatya, *Jurnal Hubungan Internasional*, (2021).

Monica, Elisabeth M. dan Rosalyn Theodora. "Evaluasi Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Internasional (PMI) Sektor Informal di Arab Saudi 2011-2018" *Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan*, Volume 11, No. 1 (Januari 2019): 34.

Mubarok, Acep Zoni Saeful. "Reformasi Konstitusi Dan Yudisial Dalam Bingkai Konstitutionalisme di Arab Saudi," *Journal of Islamic Studies and Humanities* Vol. 2, No. 1 (2017): 5.

Murofikoh, Dede Ika, Dini Inasyah Alfaridah, dan Novita. "Perbandingan Ideologi Negara Indonesia dengan Arab Saudi," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* Vol. 1, No. 02 (Desember 2022): 185.

Mustafidin, Ahmad. "Moderasi Beragama dalam Islam dan Relevansinya dengan Konteks Keindonesiaan," *Jurnal Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim*, Vol. 9, No. 2 (Desember 2021): 209.

Muttaqin, Fakih Fadilah. "Perubahan Sosial Budaya Kerajaan Arab Saudi Sebagai Pengaruh Proxy War dalam Konflik Suriah

Tahun 2011-2018,” *HIMMAH: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 6 No. 1 (Juni 2022): 470.

Nelli, Fitra. “Syaikh Ibnu Utsaimin; Fatwa dan Metode Ijtihadnya dalam Masalah Komtemporer,” *Jurnal Al-Sakinah*, Vol. XI, No. 1 (2014): 28-29.

Nirzalin. “Mendamaikan Aktor dan Struktur dalam Analisis Sosial Perspektif Teori Strukturasi Anthony Giddens,” *Jurnal Sosiologi Universitas Syiah Kuala* Vol. 3, No. 3 (Juni 2013): 15.

Putri, Misliharira Shaumi, Reni Windiani, “Satwika Paramasatya, Liberalisasi Ekonomi Arab Saudi dalam Saudi Vision 2030,” *Journal of International Relations*, Vol. 7, No. 3 (2021): 128.

Rachmadie, Cammelianne Tyiphano dan Suryo Ediyono. “Reformasi Sistem Kebudayaan di Arab Saudi Masa Pemerintahan Raja Abdullah (2005- 2015),” *Millati, Journal of Islamic Studies and Humanities* Vol. 2, No. 1 (Juni 2017): 43.

Rahayu, Teguh Imam, “Teori Pembangunan Dunia Ketiga dalam Teori Modernisasi Sub Teori Harrod-Domar (Tabungan dan Investasi),” *Gema Eksos Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, Vol. 06, No. 01 (2010), 74.

Rasyidah, Nurul Fajar. “Dinamika Sosial Kedudukan Perempuan Di Arab Saudi Era Raja Salman,” *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak* Vol. 10, No. 1 (2021): 48.

Rikandi, Nosami. “Mendeteksi Pengaruh Pasar Minyak Dunia Terhadap Krisis Harga.” *Jurnal Akuntansi Bisnis*, Vol. 1, No. 1 (2008).

Riyan Hidayat dan Yon Machmudi. “Perubahan Sosial Politik di Arab Saudi 1932-1975,” *Jurnal Kajian Timur Tengah dan Islam*, Vol. 4 No. 1 (Januari – Juni 2017).

Rosana, Ellya. “Modernisasi dan Perubahan,” *Jurnal TAPIS*, Vol. 7 No. 12 (Januari-Juni 2011): 32-33.

Rosana, Ellya. "Modernisasi dalam Perspektif Perubahan Sosial," *Al-Adyan*, Vol X, No 1 (Januari-Juni 2015): 68.

Rosida, Anis. "Wacana Modernisasi dalam Tantangan Peradaban, Peran Perempuan Sebagai Tonggak Sejarah Saudi Arabia," *PALITA: Journal of Social-Religi Research* Vol. 3, No. 1 (April 2018): 1.

Rozi, Fatkhur. "Kebijakan Ruang Publik Wanita: Agenda Politik Kepentingan Ganda Saudi," *Jurnal Internasional Ihya' 'Ulum al-Din*, (2017).

Ruslin, Ismah Tita. "Memetakan Konflik di Timur Tengah," *Jurnal Politik Profetik*. Vol.1 no.1 (2013).

Salihima, Syamsuez. "Muhammad bin Abdul Wahab 1703-1791 (Sejarah dan Perjuangan)," *Jurnal Adabiyah*, Vol. IX, No. 2 (2009).

Salsabila, Luthfiyah Rahma, Madian Muhammad Muchlis, "Analisis Stabilitas Perekonomian di Arab Saudi Dampak Adanya Diversifikasi Ekonomi," *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan West Science* Vol. 2, No. 01 (Januari 2024): 102.

Shofi, Ibnu. "Analisis Teori Otoritas Max Weber dalam Kepemimpinan Multikultural Kyai sholeh Bahruddin Ngalah, Studi Kepemimpinan Multikultural di Pondok Pesantren Ngalah Pasuruan," *Jurnal Kependidikan Islam*, Vol. 11, No. 1 (Tahun 2021): 143.

Solihah, Ratnia. "Pola Hubungan Bisnis dan Politik di Indonesia Masa Reformasi: Kasus Rent Seeking," *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 1, No.1, (2016).

Tampubolon, Ichwansyah. "Oreintasi dan Corak Pembaruan dalam Islam: Kajian Terhadap Respons Masyarakat Islam," *MADANIA* Vol. XVIII, No. 1 (Juni 2014): 18.

Wahyuddin, Imam. "Perkembangan Islam di Arab Saudi," *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, Vol. 10, No. 2 (September 2018): 425.

Warsito, Adi dan Serli Wulandari. "Konsep Pemerintahan Arab Saudi dan Visi 2030," *Tanjak: Jurnal Sejarah dan Peradaban Islam* Vol. 2, No. 3 (2022): 234.

Yahya Al Alhareth, Ibtisam Al Dighrir, & Yasra Al Alhareth. "Review Pendidikan Tinggi Wanita di Arab Saudi," *American Journal of Educational Research*, (2015).

Zahir, Mustofa. "Kebijakan Arab Saudi Melakukan Intervensi Militer di Yaman dalam Perspektif Level Analisis Individu," *Journal of International Relations* Vol. 5, No. 2 (2019): 293.

Zulifa, Muhammad, Visi Saudi 2030, Transformasi Menuju Era Kerajaan Modern, *Jurnal 2 Mei 2016*. jasar.com.

Zulifan, "Reposisi Identitas Sosial Perempuan Saudi Pasca Terbitnya Visi Saudi 2030," *Nady Al-Adab: Jurnal Bahasa Arab*, Vol. 19 Issue 2 (November 2022): 65-66.

